

Vol. 3 | No. 2 | Tahun 2020

# **SUARA DARI SENAYAN:**

## **PANDANGAN WAKIL RAKYAT TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN AGAMA**



**CONVEY Indonesia**  
**PPIM UIN Jakarta - UNDP Indonesia**



# SUARA DARI SENAYAN:

Pandangan Wakil Rakyat tentang Peran  
Negara dalam Pendidikan Agama



**CONVEY REPORT**

Suara dari Senayan: Pandangan Wakil Rakyat tentang Peran Negara  
dalam Pendidikan Agama  
Vol. 3 No. 2 Tahun 2020

**Penanggung Jawab:**

PPIM UIN Jakarta; UNDP Indonesia

**Penulis:**

Sirojuddin Arif & Yunita Faela Nisa

**Tim Peneliti:**

Yunita Faela Nisa, Sirojuddin Arif, Agung Priyo Utomo, Bambang Ruswandi

**Desain Cover & Layout:**

Oryza Rizqullah

**ISSN:**

977-272-38070-0-6

**Penerbit:**

PPIM UIN Jakarta  
Jalan Kertamukti No. 5 Pisangan Barat Ciputat 15419  
Kota Tangerang Selatan Banten 15419 INDONESIA  
Telp. (62 21) 749-9272  
Email: ppim@uinjkt.ac.id

## Ucapan Terima Kasih

Convey Report ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pandangan anggota DPR RI tentang peran negara dalam pendidikan agama, khususnya di sekolah negeri. Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan survei PPIM berjudul “Pandangan Anggota DPR RI tentang Kebangsaan, Pendidikan dan Agama di Indonesia”. Secara spesifik laporan ini membahas persoalan pendidikan mengingat pentingnya posisi sekolah dalam menjaga kebinekaan, terlebih di tengah-tengah meningkatnya sikap atau pandangan yang intoleran terhadap pemeluk agama atau pemahaman keagamaan lain di lingkungan sekolah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peneliti senior PPIM, khususnya Jamhari Makruf, Ismatu Ropi, Didin Syafruddin, Fuad Jabali, Idris Thoaha dan Saiful Umam atas segala bantuan yang diberikan dalam penyusunan instrumen survei dan penulisan laporan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Hendro Praseyto, Burhanuddin Muhtadi, Philips Vermonte, dan Titi Angraini atas masukan-masukan mereka yang sangat berharga dalam proses penyusunan instrumen survei maupun pembahasan hasilnya. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para peneliti PPIM, khususnya M. Zaki Mubarak, Muhammad Takdir, Ikhwan Luthfi, dan Yufi Adriani atas pandangan dan masukan mereka terhadap draf awal laporan ini. Kami juga berterima kasih kepada Dani dan Utami Sandyarani dari UNDP Jakarta atas segala bantuan dan saran-saran konstruktif mereka dalam perumusan instrumen maupun pembahasan hasil survei. Tak lupa, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami yang sebesar-besarnya terhadap para anggota DPR RI yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan survei ini, dan para enumerator yang dengan sabar membantu pengumpulan data. Tanpa bantuan semua pihak tersebut, laporan ini tidak akan dapat terwujud. Namun demikian, segala kekurangan dan kesalahan dalam laporan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis.



## Ringkasan Eksekutif

### LATAR BELAKANG

Dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, partai politik memiliki peran strategis. Partai politik menjadi aktor penting yang berfungsi menangkap aspirasi politik warga, termasuk pada hal-hal yang terkait dengan agama dan pendidikan agama (Mujani & Liddle, 2018; Muhtadi & Mietzner, 2019; LIPI, 2018, 2019). Melalui wakil-wakilnya – yang terpilih sebagai wakil rakyat—di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), partai politik baik yang mendapatkan suara banyak maupun yang mendapatkan suara lebih kecil, tetap dapat memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan publik melalui fungsi mereka sebagai penyedia *check and balances* bagi pemerintah.

Terkait dengan kehidupan keagamaan, peran anggota legislatif menjadi sangat penting. Mereka diharapkan dapat memberikan arah kebijakan yang lebih baik di tengah munculnya sikap dan perilaku keagamaan yang eksklusif, tertutup, anti-kewargaan, anti-negara bahkan pro-kekerasan di masyarakat dalam beberapa saat terakhir (PPIM, 2016, 2017, 2018; Puspidep, 2017, 2018). Hasil studi PPIM (2018) menunjukkan bahwa dalam level sikap/opini, sekitar 58,5 persen siswa dan mahasiswa memiliki pandangan keagamaan yang cenderung radikal, dan 51,1 persen memiliki pandangan keagamaan yang cenderung intoleran secara internal. Secara eksternal, sebanyak 34,3 persen siswa dan mahasiswa menunjukkan pemahaman keagamaan yang cenderung intoleran. Di kalangan para guru agama.

Sesuai dengan salah satu tugas DPR RI untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, lembaga ini diharapkan dapat memainkan peran penting untuk merawat kebinekaan yang ada, termasuk melalui pendidikan. Akan tetapi, sejauh ini tidak banyak informasi yang tersedia tentang sikap dan pandangan anggota DPR RI tentang peran negara dalam pendidikan agama. Studi tentang anggota legislatif sejauh ini lebih terfokus pada aspek politik lembaga legislatif, seperti interaksi antara presiden atau eksekutif dan lembaga legislatif dalam kerangka sistem presidensial multi partai (Hanan, 2014). Beberapa peneliti telah berusaha untuk melihat persoalan-persoalan lain seperti kinerja anggota legislatif dan kepercayaan publik terhadap mereka (INSIS, 2013; FORMAPPI, 2018; Lingkaran Survei Indonesia, 2018; dan Poltracking, 2017). Namun demikian, sedikit sekali penelitian yang secara sistematis mempelajari pandangan individual masing-masing anggota DPR RI tentang isu-isu penting dalam politik nasional atau kebijakan publik, khususnya terkait dengan pendidikan agama.

### FOKUS KAJIAN

Untuk memotret pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama, penelitian ini mendasarkan diri pada dua hal. Pertama, penelitian ini banyak memanfaatkan pandangan para sarjana atau peneliti perbandingan pendidikan agama untuk mendapatkan pemahaman

yang baik tentang pola-pola pendidikan agama di berbagai masyarakat yang berbeda. Kedua, mengingat eratnya hubungan agama dan negara bukan hanya dalam pendidikan agama melainkan juga dalam perumusan kebijakan pendidikan agama, penelitian ini juga menggunakan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang hubungan agama dan negara sebagai salah satu dasar pijakan untuk dapat melihat pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama dengan lebih baik.

## KONSEP YANG DIGUNAKAN

### Variasi Model Pendidikan Agama

Berdasarkan tujuan pendidikan dan materi yang diajarkan, secara umum pendidikan agama dapat dibedakan ke dalam tiga model, yakni (1) pendidikan ke dalam agama, (2) pendidikan tentang agama, dan (3) pendidikan dari agama (Schreiner, 2005). Pendidikan ke dalam agama adalah model pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama tertentu kepada peserta didik. Sering disebut *confessional religious education*, tujuan model pendidikan ke dalam agama adalah untuk mengajarkan siswa menjadi sosok yang saleh dan taat menjalankan ajaran agama masing-masing. Pendidikan tentang atau dari agama tidak menekankan pembentukan kesalehan agama dalam diri masing-masing siswa, melainkan untuk memperkenalkan keragaman agama yang ada (termasuk agama selain yang dianut oleh siswa) atau mengajari siswa untuk mengambil pelajaran dari setiap agama yang diajarkan sebagai nilai-nilai universal. Model pendidikan agama seperti ini juga dikenal sebagai *non-confessional religious education*.

### Negara dan Kebijakan Pendidikan Agama

Memperhatikan luasnya spektrum hubungan agama dan negara dan variasi model pendidikan agama, pendidikan agama secara umum dapat dibedakan ke dalam empat kategori berbeda yakni 'laicite', 'netral-agama', 'akomodasionis', dan 'intervensionis' Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1, keempat pilihan arah kebijakan ini memiliki pandangan yang berbeda tentang sejauh mana negara terlibat dalam pendidikan agama, khususnya di sekolah negeri.

**Tabel 1.**  
Peran Negara dalam Pendidikan Agama

<i>Laicite/Enggan</i>	<i>Netral Agama</i>	<i>Akomodasionis</i>	<i>Intervensionis</i>
Agama dipandang sebagai hal privat, negara tidak ikut campur di dalamnya.	Mendukung netralitas negara dalam urusan agama.	Negara memandang beberapa agama penting, namun tidak hanya agama mayoritas saja.	Agama dan politik tidak dapat dipisahkan.

<i>Laicite/Enggan</i>	Netral Agama	Akomodasionis	Intervensionis
Aktif mengeluarkan agama dari sekolah negeri.	Membuka ruang atau menutupnya untuk seluruh kelompok agama yang ada.	Negara memfasilitasi beberapa agama yang diakui.	Pendidikan agama terkait erat dengan kepentingan mempertahankan peran agama mayoritas dalam negara.
Mengurangi porsi atau menghapuskan pendidikan agama di sekolah negeri.	Pendidikan agama untuk nilai-nilai universal kemanusiaan.	Pendidikan agama diselenggarakan hanya oleh kelompok agama yang diakui negara.	Memberikan keistimewaan kepada agama mayoritas untuk mempertahankan dominasi dalam berbagai bidang.

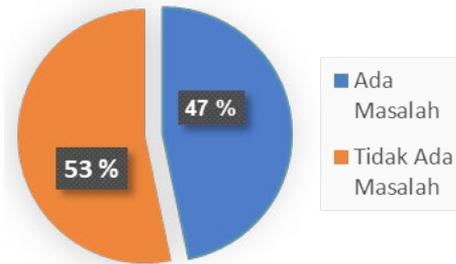
## METODE PENELITIAN

Ringkasan eksekutif ini didasarkan pada survei lengkap terhadap anggota DPR RI periode 2019-2024, yang berjumlah 575 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan setiap responden. Data dikumpulkan oleh enumerator terlatih pada periode 21 Oktober – 17 Desember 2019 dengan *response rate* sebesar 68,1%. Dengan kata lain, penelitian ini berhasil mewawancarai 380 data anggota DPR RI. Untuk menjamin kualitas data, penelitian ini melakukan mekanisme *spot check* sebanyak 100% dari data yang didapatkan. Dari data yang telah didapatkan, sebanyak 10 data tidak lengkap, sehingga data yang dianalisis sebanyak 370 (64,6%).

Beberapa pengujian terhadap *response rate* sudah dilakukan, diantaranya dengan memeriksa perbedaan proporsi pada beberapa variabel, yaitu jenis kelamin, umur anggota DPR RI baik secara keseluruhan maupun per partai politik. Pengujian ini dilakukan untuk mengecek sejauh mana *non-response rate* dalam survei ini mempengaruhi hasil analisis. Dapat disimpulkan bahwa *non-response* menyebar secara acak. Oleh karena itu, secara statistik dapat dikatakan bahwa *bias non-response* yang terjadi relatif kecil.

## BEBERAPA TEMUAN PENTING

Berikut ini akan dipaparkan beberapa temuan penting dari survei lengkap ini. Pertama, tidak banyak anggota DPR RI yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan-persoalan terkait wawasan kebangsaan, akses kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama, dan pemahaman tentang keragaman agama dalam pendidikan agama. Berikut ini, data terkait pandangan anggota DPR RI mengenai ada tidaknya masalah dalam pendidikan agama:



**Gambar 1.**

Pandangan tentang ada tidaknya persoalan dalam pendidikan agama

Dari total 370 responden survei ini yang menganggap ada persoalan dalam pendidikan agama sebanyak 47 persen. Dari 47 persen tersebut, hanya 19,46 responden yang menilai kurangnya pemberian wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama sebagai satu persoalan serius. Persentase responden yang menilai masih kurangnya pemberian pemahaman yang baik tentang keragaman di Indonesia sebagai masalah serius lebih sedikit lagi, yakni hanya 12,16 persen dari total 370 responden. Dalam konteks meningkatnya pandangan dan bahkan perilaku intoleran atau eksklusif di lingkungan sekolah, temuan ini menjadi kabar yang kurang menggembirakan bagi DPR RI sebagai lembaga, yang salah satu fungsinya adalah merawat kebinekaan masyarakat di negeri ini, dan juga bagi masyarakat luas. Kedua, hasil survei lengkap juga menunjukkan adanya pandangan yang cukup beragam di kalangan anggota DPR RI tentang peran negara dalam pendidikan agama.

Mayoritas responden survei lengkap ini menunjukkan kecenderungan akomodasionis dalam kebijakan-kebijakan terkait dengan format dasar pendidikan agama. Ini mencakup pengajaran agama, kegiatan doa bersama dan penyediaan guru agama. Namun demikian, pandangan yang lebih beragam ditunjukkan oleh para responden dalam memandang aspek-aspek lain dalam pendidikan agama. Banyak responden yang menunjukkan kecenderungan intervensionis dalam kebijakan negara atau sekolah terkait pengadaan buku agama dan pelatihan bagi guru agama. Sementara itu, dalam hal-hal yang terkait dengan pengayaan pendidikan agama, banyak responden yang menunjukkan kecenderungan netral dalam meletakkan peran negara dalam pendidikan agama.

Dalam beberapa hal, variasi pandangan tersebut memberikan sedikit ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan dukungan politik bagi upaya-upaya untuk membangun budaya yang lebih inklusif dan saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda di sekolah negeri. Akan tetapi, di tengah meningkatnya sikap atau opini intoleran di lingkungan sekolah, relatif besarnya proporsi responden yang memiliki pandangan intervensionis dalam hal-hal krusial seperti pelatihan guru agama dan pengadaan buku agama layak untuk mendapatkan catatan tersendiri. Di tengah dominannya sikap akomodasionis dalam kebijakan-kebijakan terkait format pendidikan agama, relatif besarnya sikap Intervensionis memungkinkan negara untuk mengatur lebih lanjut kehidupan keagamaan warga atau siswa di sekolah, dan tidak memberikan ruang yang lebih besar bagi upaya-upaya untuk menciptakan budaya sekolah negeri yang lebih inklusif dan menghormati keragaman agama yang ada antar siswa.

**Tabel 2.**  
Klasifikasi Partai Politik

Komponen Pendidikan Agama	Pandangan
Pengadaan buku agama	Intervensionis
Pelatihan guru agama	Intervensionis
Format pendidikan agama	Akomodasionis
Kegiatan doa bersama di sekolah	Akomodasionis
Penyediaan guru agama	Akomodasionis
Ceramah Keagamaan	Netral
Sosok guru agama ideal	Netral
Penambahan jam pelajaran agama	Netral
Penambahan ruang kelas untuk pelajaran agama	Netral
Pemasangan simbol keagamaan di sekolah	Netral
Perayaan hari besar keagamaan di sekolah	Netral
Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan	Netral

Ketiga, hasil survei lengkap ini juga menemukan bahwa partai politik memiliki pengaruh yang cukup besar pada bagaimana anggota DPR RI melihat peran negara dalam pendidikan agama. Perbedaan afiliasi partai politik sedikit banyak menjelaskan perbedaan pandangan responden tentang arah kebijakan pendidikan agama. Dengan kata lain, responden dari partai-partai tertentu memiliki kecenderungan lebih besar untuk bersikap intervensionis atau netral dibandingkan dengan responden dari partai-partai lain. Pembagian partai politik berdasarkan klasifikasi identitas politik dan heterogenitas agama didapatkan dari data. Identitas politik masing-masing partai diperoleh dari platform partai yang tertera di website masing-masing partai maupun pernyataan tokoh parpol yang bersangkutan. Sedangkan heterogenitas agama didasarkan pada seberapa banyak anggota DPR RI dari partai tersebut heterogen dalam hal agama yang dianut. Berikut ini klasifikasi partai politik berdasarkan identitas politik dan heterogenitas agama.

**Tabel 3.**  
 Klasifikasi Partai Politik

Kategori Partai II (Heterogenitas Agama)		Kategori Partai I (Identitas Politik)	
Jenis Partai	Partai	Jenis Partai	Partai
Agak Heterogen	DEMOKRAT, GERINDRA, PAN, PKB	Islam Modernis	PAN, PKS, PPP
Heterogen	GOLKAR, NasDem	Islam Tradisionalis	PKB
Sangat Heterogen	PDI Perjuangan	Nasionalis	PDI Perjuangan, NasDem
Tidak Heterogen	PKS, PPP	Nasionalis-Religius	DEMOKRAT, GERINDRA, GOLKAR

Dalam hal penyediaan buku agama di sekolah, misalnya, hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa responden dari Partai Islam Modernis (PAN, PKS dan PPP) memiliki kecenderungan lebih besar untuk bersikap intervensionis dibandingkan netral dalam hal penyediaan buku agama di sekolah daripada dengan responden dari PDI Perjuangan. Hal serupa—kecuali untuk responden dari PPP—juga ditemukan dalam hal pelatihan guru agama. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4.**  
 Klasifikasi Parpol dan Kecenderungan Intervensionis

	Penyediaan Buku Agama		Pelatihan Guru Agama	
	Intervensionis	Akomodasionis	Intervensionis	Akomodasionis
Islam Modernis	5,37*** (0,54)	3,08** (0,55)	4,88*** (0,56)	4,50*** (0,59)
Islam Tradisionalis	0,71 (0,45)	0,35** (0,49)	1,30 (0,47)	0,84 (0,54)
AIC	784,87	784,87	739,73	739,73

	Penyediaan Buku Agama		Pelatihan Guru Agama	
	Intervensionis	Akomodasionis	Intervensionis	Akomodasionis
Heterogan	1,88 (0,47)	2,21* (0,46)	1,97 (0,46)	1,62 (0,51)
Tidak Heterogen	8,80*** (0,73)	5,78*** (0,74)	0,83* (0,73)	1,11** (0,76)
AIC	790,32	790,32	742,59	742,59

\*p<0.1; \*\*p<0.05; \*\*\*p<0.01. Koefisien menunjukkan *Relative Risk Ratio*

Pada tabel pertama, partai 'Nasionalis' menjadi *reference group* dalam melakukan analisis regresi logistik multinomial, sementara pada tabel kedua, partai 'Tidak Heterogen' menjadi *reference group*. Regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh semua jenis partai dan beberapa faktor sosial politik seperti keanggotaan komisi, gender, agama, asal wilayah dan heterogenitas wilayah.

Lebih lanjut tentang karakteristik partai politik yang memengaruhi perbedaan pandangan para responden, penelitian ini menemukan bahwa identitas politik partai memiliki hubungan yang cukup erat dengan pandangan anggota DPR RI tentang peran negara dalam pendidikan agama.

**Tabel 5.**  
Klasifikasi Parpol dan Kecenderungan Netral

	Sosok Guru Agama Ideal		Penambahan Jam Pelajaran	
	Netral	Akomodasionis	Netral	Akomodasionis
Islam Tradisionalis	7,05*** (0,58)	1,43 (0,51)	0,97 (0,46)	0,50 (0,51)
Nasionalis	8,89*** (0,52)	1,91 (0,44)	2,33* (0,43)	0,67 (0,49)
AIC	743,80	743,80	742,76	742,76

	Sosok Guru Agama Ideal		Penambahan Jam Pelajaran	
	Netral	Akomodasionis	Netral	Akomodasionis
Heterogan	5,36*** (0,59)	3,01** (0,50)	1,71 (0,48)	0,85 (0,53)
Sangat Heterogan	6,36*** (0,64)	2,15 (0,57)	3,41** (0,58)	1,35 (0,66)
AIC	759,44	759,44	748,05	748,05

\*p<0.1; \*\*p<0.05; \*\*\*p<0.01. Koefisien menunjukkan *Relative Risk Ratio*

Pada tabel pertama, partai 'Nasionalis' menjadi *reference group* dalam melakukan analisis regresi logistik multinomial, sementara pada tabel kedua, partai 'Tidak Heterogan' menjadi *reference group*. Regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh semua jenis partai dan beberapa faktor sosial politik seperti keanggotaan komisi, gender, agama, asal wilayah dan heterogenitas wilayah.

Tabel 5 menunjukkan bahwa responden dari partai-partai Nasionalis memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menunjukkan pandangan Netral dalam kebijakan pendidikan agama dibandingkan dengan responden dari partai-partai Islam Modernis, khususnya dalam penambahan jam pelajaran agama. Sebaliknya, responden dari partai-partai Islam Modernis memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan responden dari partai-partai Nasionalis untuk bersikap Intervensionis dalam pendidikan agama, khususnya dalam penyediaan buku agama dan pelatihan guru agama. Bagi masyarakat dan khususnya elemen masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada isu-isu kebangsaan dan kebinekaan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, hasil studi ini memberikan gambaran yang lebih jernih tentang peta politik di DPR RI terkait dengan posisi partai politik dan hal yang melandasinya dalam melihat peran negara dalam pendidikan agama.

Sebagai catatan penutup, hasil survei lengkap ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah meningkatnya sikap atau pandangan yang cenderung intoleran di lingkungan sekolah, DPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang memegang peranan penting dalam perumusan arah kebijakan pendidikan agama menunjukkan sikap atau posisi yang kurang jelas dalam menyikapi persoalan yang ada. Selain relatif sedikitnya proporsi anggota DPR RI yang memandang masalah-

masalah terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan, pemahaman keragaman agama, dan akses kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan sebagai persoalan penting yang harus mendapatkan perhatian serius, cukup banyak anggota DPR RI yang menunjukkan kecenderungan intervensionis dalam meletakkan peran atau kedudukan negara dalam pendidikan agama.

## **REKOMENDASI**

Hasil survei lengkap ini mengindikasikan relatif sedikitnya proporsi anggota DPR RI yang memiliki perhatian besar terhadap isu-isu kebangsaan dan keragaman dalam pendidikan agama menuntut para anggota legislatif, terutama mereka yang bertugas di komisi terkait, untuk melakukan dialog dengan kelompok berbeda mengenai persoalan kebangsaan dan keragaman. Dialog dilakukan khususnya terkait peran penting DPR RI dalam merawat kebinekaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Partai politik juga memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan kader-kadernya yang bertugas di DPR RI, terlebih mereka yang akan berada di komisi-komisi yang menangani masalah pendidikan dan agama. Hal ini diperlukan untuk dapat memahami seluk beluk persoalan pendidikan agama dengan baik, dan menyikapi masalah-masalah yang ada, khususnya terkait dengan masalah-masalah kebangsaan dan keragaman, dengan tepat. Tanpa peran aktif lembaga legislatif untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya, akan susah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul akibat meningkatnya intoleransi keagamaan, dan mewujudkan budaya sekolah yang toleran dan saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda.

Selain itu, eratnya keterkaitan identitas politik partai dan pandangan intervensionis mengisyaratkan bahwa upaya untuk memperkuat penghargaan pada keragaman memerlukan kontrol demokratis lebih besar bagi elemen masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasinya dalam perumusan kebijakan pendidikan agama di sekolah negeri. Di tingkat pusat, DPR RI dan partai politik perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mulai diusulkan oleh beberapa kalangan. Kontrol demokratis perlu diberikan bukan hanya bagi perwakilan dari kelompok-kelompok yang besar secara jumlah, melainkan juga dari mereka-mereka yang selama ini terpinggirkan atau terdiskriminasi dalam hal urusan agama sehingga hak-hak kelompok minoritas dalam pendidikan agama tetap terjaga.

Ruang demokratis tersebut perlu dibuka bukan hanya di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat lokal dan bahkan hingga di tingkat sekolah. Perumusan aturan atau kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama perlu memberi ruang yang seluas-luasnya bagi perwakilan masyarakat, khususnya wali murid, untuk menjaga dan memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari apa pun agamanya, mendapat layanan pendidikan agama dan perlakuan yang baik di sekolah tempat mereka belajar. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan budaya sekolah yang ramah dengan keragaman dan lebih menghormati perbedaan yang ada di antara siswa dan di lingkungan sekolah pada umumnya.

## Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih .....	iii
Ringkasan Eksekutif .....	v
Daftar Isi .....	xiii
Latar Belakang .....	1
Fokus Kajian dan Kerangka Analisis .....	3
a. Fokus Kajian .....	3
1. Spektrum Hubungan Agama dan Negara .....	4
2. Variasi Model Pendidikan Agama .....	6
3. Negara dan Kebijakan Pendidikan Agama .....	6
b. Kerangka Analisis .....	9
Metode Penelitian .....	14
Gambaran Umum Subjek Penelitian .....	15
Pandangan Anggota Dpr RI tentang Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama.....	19
Agama, Politik dan Pandangan Anggota Dpr RI tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama .....	25
a. Pandangan Anggota DPR RI tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama .....	25
b. Pandangan Politisi Muslim di DPR RI tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama .....	32
Partai Politik dan Kebijakan Pendidikan Agama .....	36
Kesimpulan .....	41
Daftar Pustaka .....	45
Profil Penulis dan Peneliti .....	46
Profil Lembaga .....	47



## Latar Belakang

Partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi memiliki peran strategis bukan hanya dalam menentukan dinamika kehidupan politik suatu masyarakat melainkan juga dalam merumuskan kebijakan publik. Partai politik menjadi aktor penting yang berfungsi mengagregasikan kepentingan dan aspirasi politik warga. Pada saat menjadi pemenang pemilu, partai politik melalui wakil-wakil mereka di lembaga eksekutif memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan bentuk dan arah kebijakan karena mereka memiliki otoritas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

Namun demikian, peran penting partai politik tidak terbatas hanya pada saat mereka menjadi pemenang pemilu. Ketika suatu partai politik mengalami kekalahan dalam pemilu dan tidak duduk dalam lembaga pemerintahan, partai tersebut tetap dapat memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik. Melalui wakil-wakilnya –yang terpilih sebagai wakil rakyat—di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), partai tersebut tetap dapat memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan publik melalui fungsi mereka sebagai penyedia *check and balances* bagi pemerintah. Anggota legislatif juga memainkan peran besar dalam merumuskan perundang-undangan, termasuk dengan hal-hal yang terkait dengan agama dan pendidikan agama (Mujani & Liddle, 2018; Muhtadi & Mietzner, 2019; LIPI, 2018, 2019).

Terkait dengan kehidupan keagamaan, peran anggota legislatif menjadi sangat penting dan diharapkan sebagai penentu arah kebijakan di tengah munculnya sikap dan perilaku keagamaan yang eksklusif, tertutup, anti-kewargaan, anti-negara bahkan pro-kekerasan di masyarakat dalam beberapa saat terakhir (PPIM, 2016, 2017, 2018; Puspidep, 2017, 2018). Hasil studi PPIM (2018) menunjukkan bahwa dalam level sikap/opini, sekitar 58,5 persen siswa dan mahasiswa memiliki pandangan keagamaan yang cenderung radikal, dan 51,1 persen memiliki pandangan keagamaan yang cenderung intoleran secara internal. Secara eksternal, sebanyak 34,3 persen siswa dan mahasiswa menunjukkan pemahaman keagamaan yang cenderung intoleran. Di kalangan para guru agama, hasil survei PPIM yang lain (PPIM, 2019) menunjukkan bahwa berdasarkan alat ukur implisit, sebesar 63,07 persen guru memiliki pandangan keagamaan yang intoleran terhadap pemeluk agama lain. Penggunaan alat ukur eksplisit tentang intoleransi keagamaan tidak menunjukkan perbedaan jauh dengan hasil pengukuran alat ukur implisit. Alat ukur eksplisit menunjukkan bahwa hampir 57 persen guru memiliki pandangan keagamaan yang intoleran terhadap pemeluk agama lain.

Sesuai dengan salah satu tugas DPR RI untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, lembaga ini diharapkan dapat memainkan peran penting untuk merawat kebinekaan yang ada, termasuk melalui pendidikan. Akan tetapi, sejauh ini tiak banyak informasi yang bisa didapatkan tentang sikap dan pandangan anggota DPR RI tentang hal ini. Studi tentang anggota legislatif sejauh ini lebih terfokus pada aspek politik lembaga legislatif, seperti interaksi antara presiden atau eksekutif dan lembaga legislatif dalam kerangka sistem presidensial multi partai (Hanan, 2014). Beberapa peneliti telah berusaha untuk melihat persoalan-persoalan lain seperti kinerja anggota legislatif dan kepercayaan publik terhadap mereka (INSIS, 2013; FORMAPPI, 2018;

Lingkaran Survei Indonesia, 2018; dan Poltracking, 2017). Namun demikian, sedikit sekali penelitian yang secara sistematis mempelajari pandangan individual masing-masing anggota DPR RI tentang isu-isu penting dalam politik nasional atau kebijakan publik, khususnya terkait dengan pendidikan agama.

Kajian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Ia merupakan bagian dari penelitian lebih besar yang dimaksudkan untuk menggali pandangan anggota DPR RI tentang agama, kebangsaan, dan pendidikan agama. Penelitian ini mencakup hal-hal antara lain: a) persepsi anggota DPR RI tentang agama, demokrasi dan kebangsaan; b) sikap dan pandangan mereka tentang persoalan-persoalan kebangsaan dalam pendidikan agama; dan c) sikap dan pandangan mereka tentang kebijakan pendidikan agama, khususnya di sekolah negeri.

Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari program lebih besar berjudul “Penanggulangan Ekstremisme Radikal” (*Counter Violent Extremism*, CONVEY). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peluang dan upaya menjadikan hasil riset untuk kebijakan dan advokasi penanggulangan ekstremisme radikal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam upaya menangkal *violent extremism* di Indonesia, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) maupun produk-produk kebijakan lain yang relevan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan yang berharga bagi upaya peningkatan peran anggota DPR RI dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik terkait dengan persoalan-persoalan agama, kebangsaan dan pendidikan agama di Indonesia.

Dalam konteks yang lebih luas, survei tentang pandangan anggota DPR RI tentang isu-isu kebangsaan atau kebijakan publik diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang sangat berarti bagi kajian politik kebijakan publik di Indonesia, terutama politik kebijakan di lembaga legislatif. Tidak adanya catatan yang rapi dan sistematis tentang pilihan kebijakan setiap anggota DPR RI dalam beberapa pengambilan suara yang pernah dilakukan di DPR RI membuat para peneliti dan juga masyarakat pada umumnya kesulitan untuk memahami bagaimana sebenarnya sikap dan pandangan para anggota DPR RI dalam isu-isu penting di negeri ini. Dalam konteks ini, survei ini menjadi sangat penting dan diperlukan untuk memahami dan menjelaskan sejauh mana anggota DPR RI bersepakat atau tidak bersepakat dalam persoalan-persoalan penting yang menjadi perhatian publik, dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi sikap dan pandangan masing-masing anggota DPR RI dalam persoalan-persoalan tersebut.

Akan tetapi, karena keterbatasan ruang dalam laporan ini, kami terpaksa membatasi pembahasan dalam laporan ini hanya pada pandangan anggota DPR RI tentang persoalan dan kebijakan pendidikan agama. Secara umum, laporan ini dimaksudkan untuk mengkaji pandangan anggota legislatif tentang upaya-upaya yang bisa dan perlu dilakukan untuk membangun ketahanan bangsa dan mencegah kekerasan ekstremisme melalui pendidikan agama di Indonesia. Dalam konteks sosial politik masyarakat majemuk seperti Indonesia, pendidikan agama diharapkan bebas dari diskriminasi dan aksi-aksi kekerasan. Lebih dari itu, pendidikan agama diharapkan dapat berkontribusi pada upaya memperkuat toleransi,

harmoni, saling pengertian dan saling, dan kolaborasi antara komunitas agama serta antara penganut kepercayaan yang berbeda.

## Fokus Kajian dan Kerangka Analisis

Bagian ini akan mendiskusikan dua hal terkait, yakni fokus kajian dan kerangka analisis yang dipakai untuk menjelaskan persoalan pokok yang dikaji. Sebagaimana telah disebutkan, fokus kajian dalam laporan ini adalah pandangan anggota DPR RI tentang pendidikan agama di Indonesia. Secara lebih spesifik, laporan ini akan menjawab dua pertanyaan pokok berikut:

1. Terkait dengan gejala munculnya sikap-sikap atau pandangan keagamaan yang intoleran di lingkungan sekolah, sejauh mana anggota DPR RI memandang hal-hal terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan pemahaman keragaman sebagai hal penting dalam pendidikan agama?
2. Di tengah tarik ulur hubungan agama dan negara yang terjadi di Indonesia dalam beberapa saat terakhir, bagaimana pandangan DPR RI tentang orientasi kebijakan pendidikan agama ke depan? Sejauh mana afiliasi partai politik mempengaruhi perbedaan pandangan antar anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama? Apa yang melandasi perbedaan antar partai politik?

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana penelitian ini berupaya mendapatkan gambaran yang objektif tentang pandangan para anggota DPR RI tentang persoalan-persoalan tersebut. Sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut, penelitian ini menggabungkan perspektif ilmu politik tentang hubungan agama dan negara dan perspektif kajian perbandingan kebijakan pendidikan tentang model-model kebijakan pendidikan agama untuk menyusun piranti metodologis yang baik untuk memotret pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama. Selain itu, bagian ini juga akan membahas kerangka analisis yang akan dipakai untuk menjelaskan variasi pandangan anggota DPR RI tentang persoalan tersebut.

### a. Fokus Kajian

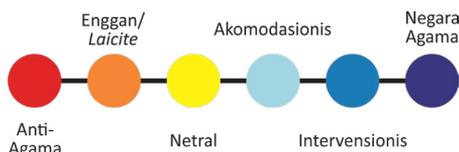
Untuk memotret pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama dengan baik, penelitian ini didasarkan pada dua hal. Pertama, penelitian ini banyak memanfaatkan pandangan para ahli perbandingan pendidikan agama untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang pola-pola pendidikan agama di berbagai masyarakat yang berbeda. Kedua, penelitian ini juga menggunakan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang hubungan agama dan negara sebagai salah satu dasar pijakan untuk memotret pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama. Untuk itu, penjelasan yang lebih rinci tentang dua hal tersebut diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang poin-poin utama dalam penelitian ini. Secara ringkas, beberapa paragraf berikut akan mendiskusikan hubungan agama dan negara dalam politik pendidikan agama dan sejauh mana pandangan tentang hubungan antara agama dan negara tersebut dapat memberi informasi yang lebih baik tentang pola-pola kebijakan pendidikan agama.

## 1. Spektrum Hubungan Agama dan Negara

Politik kebijakan pendidikan agama dapat dijelaskan dalam kerangka hubungan antara agama dan negara. Lembaga pendidikan, terutama sekolah negeri, adalah ruang publik yang berada dalam kontrol negara. Oleh karena itu, format pendidikan agama di sekolah negeri akan banyak dipengaruhi oleh sikap dan pandangan para pengambil kebijakan, termasuk anggota lembaga legislatif, tentang hubungan agama dan negara. Mereka yang menginginkan peran yang besar bagi agama dalam negara cenderung akan memberikan ruang yang besar bagi pendidikan agama di sekolah negeri. Sebaliknya, mereka yang menginginkan peran minimal agama dalam negara cenderung akan membatasi keberadaan pendidikan agama di sekolah negeri, atau mengatur pendidikan agama sedemikian rupa sehingga peran agama dalam politik dapat lebih terkontrol. Perbedaan pandangan ini lanjut akan mempengaruhi pilihan kebijakan seseorang bukan hanya tentang perlu tidaknya pendidikan agama. Namun lebih dari itu, perbedaan pandangan tersebut dapat mempengaruhi sejauh mana atau bagaimana agama akan diajarkan kepada para siswa.

Di beberapa negara, pentingnya peran pendidikan dalam pembentukan generasi mendatang telah membuat sekolah menjadi arena strategis bagi berbagai pihak untuk menyuarakan kepentingan mereka (Skeie, 2006, p. 19; Kuru, 2007, p. 569; Schreiner, 2005, p. 8). Pertentangan ini bersumber bukan hanya pada perbedaan pandangan keagamaan yang dianut oleh masing-masing pihak, namun secara politik berakar pada perbedaan sikap atau pandangan mereka terkait hubungan antara agama dan negara. Namun demikian, perlu dipahami bahwa pertentangan tersebut tidak dapat digambarkan secara sederhana sebagai pertentangan antara mereka yang memfasilitasi atau sebaliknya membatasi agama dalam pendidikan. Seperti halnya variasi pandangan tentang hubungan antara agama dan negara, sikap atau pandangan seseorang tentang pendidikan agama dapat memiliki spektrum yang lebih luas dibandingkan dua kecenderungan besar (memfasilitasi versus membatasi) tersebut.

Secara sistematis, variasi sikap atau pandangan tentang hubungan agama dan negara dapat digambarkan dalam garis continuum hubungan agama dan negara sebagai berikut (gambar 1). Jika sisi sebelah kanan merepresentasikan posisi pihak yang memberi ruang kepada agama dalam negara, sisi sebelah kiri menunjukkan posisi pihak yang membatasi peran agama dalam negara. Secara teoretik terdapat dua posisi ekstrim yang berlawanan secara diametral. Posisi ekstrim sebelah kiri menggambarkan posisi mereka yang bersikap antipati atau menolak agama secara keseluruhan dalam negara ('anti agama'). Sebaliknya, di posisi ekstrim sebelah kanan adalah pihak yang menyatukan agama dan negara ('negara agama'). Posisi terakhir ini dapat ditemukan dalam negara yang didasarkan pada agama seperti Arab Saudi atau Iran di dunia Islam atau Vatikan di dunia Katolik. Sebaliknya, sikap antipati terhadap agama dapat ditemukan dalam negara komunis seperti China, Cuba dan Korea Utara (Kuru, 2007, p. 570).



Gambar 1.  
Hubungan Agama dan Negara

Tepat di antara kedua kubu ekstrim tersebut terdapat apa yang dapat disebut sebagai posisi 'netral-agama', yakni posisi dimana negara tidak membatasi keberadaan agama di ranah publik namun sebaliknya juga tidak memfasilitasi peran agama dalam negara. Namun demikian, negara memberi ruang atau kebebasan bagi warganya untuk mengekspresikan sikap atau pandangan keagamaannya di wilayah publik, termasuk di sekolah negeri, selama hal itu tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut (Kuru, 2007).

Selain ketiga posisi tersebut, garis kontinum hubungan agama dan negara masih dapat memuat, paling tidak, dua posisi lain. Yang pertama adalah posisi di antara 'anti agama' dan 'netral-agama'. Meski tidak sepenuhnya menolak keberadaan agama dalam negara, mereka yang berada di posisi ini memiliki kecenderungan untuk membatasi peran agama dalam negara. Dalam penelitian ini, kami menyebutnya dengan istilah '*laicite*' (Kuru, 2007). Berbeda dengan posisi 'netral-agama', *laicite* memiliki sikap yang lebih negatif terhadap peran agama dalam negara atau wilayah publik. Dalam banyak hal, pendukung *laicite* akan secara aktif berupaya membatasi peran agama di wilayah public seperti sekolah negeri.

Kedua, di antara posisi 'netral-agama' dan 'negara agama' terdapat posisi yang menunjukkan kecenderungan untuk 'bersahabat dengan agama'. Meski tidak menjadikan agama sebagai dasar negara, posisi ini memberikan pengakuan atau ruang yang relatif besar bagi peran agama dalam negara. Perwujudan sikap atau pandangan politik ini dapat dilihat pada sikap negara terhadap agama di beberapa negara Eropa seperti Denmark, Inggris dan Yunani, yang memberi pengakuan terhadap satu agama besar yang sudah mapan dalam masyarakat (Kuru, 2007).

Dengan memperhatikan beragam posisi tersebut, penelitian ini membuka ruang yang lebih luas untuk mendiskusikan beragam pandangan yang ada terkait dengan pendidikan agama di sekolah negeri. Berbeda dengan pandangan sebagian kalangan, yang cenderung mengelompokkan perbedaan pandangan tentang pendidikan agama ke dalam dua kubu besar, yakni agamis dan sekuler, cara pandang penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya sikap atau pandangan yang berada di antara kedua cara pandang tersebut. Selain itu, cara pandang penelitian ini juga terbuka terhadap kemungkinan bahwa pola perdebatan terkait pendidikan agama dapat berbeda satu persoalan ke persoalan lain.

## 2. Variasi Model Pendidikan Agama

Berdasarkan tujuan pendidikan dan materi yang diajarkan, secara umum pendidikan agama dapat dibedakan menjadi tiga model, yakni (1) pendidikan ke dalam agama, (2) pendidikan tentang agama, dan (3) pendidikan dari agama (Schreiner, 2005). Pendidikan ke dalam agama adalah model pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama tertentu kepada peserta didik. Dengan demikian, siswa atau peserta didik akan mengambil mata pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Dalam banyak literatur perbandingan pendidikan agama, model pendidikan ini juga disebut dengan istilah *confessional religious education*. Tujuan model pendidikan ini adalah untuk membentuk siswa atau warga negara yang taat dan menjalankan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, model pendidikan ini mensyaratkan setiap guru agama memiliki pemahaman yang baik tentang agama masing-masing. Sama seperti kondisi siswa, sang guru juga akan mengajarkan mata pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut.

Berbeda dengan model pendidikan ke dalam agama, pendidikan tentang atau dari agama tidak menekankan pembentukan kesalehan agama dalam diri masing-masing siswa. Akan tetapi, pendidikan agama lebih dimaksudkan untuk memperkenalkan keragaman agama yang ada (termasuk agama selain yang dianut oleh siswa) atau mengajari siswa untuk mengambil pelajaran dari setiap agama yang diajarkan. Dalam literatur kajian pendidikan agama, model pendidikan agama seperti ini juga dikenal sebagai *non-confessional religious education*.

Karena sifatnya yang *non-confessional*, model pendidikan tentang atau dari agama tidak mensyaratkan kesamaan agama antara agama yang dianut oleh guru atau murid dengan pelajaran agama yang diberikan atau dipelajari. Seorang guru yang beragama Islam dapat mengajarkan materi pelajaran agama Kristen atau Katolik atau sebaliknya. Demikian juga halnya dengan siswa. Mereka yang beragama Islam dapat belajar tentang Kristen atau Katolik atau sebaliknya. Hal tersebut dimungkinkan karena tujuan pendidikan agama bukan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai agama tertentu dalam diri siswa melainkan lebih untuk memberikan pengertian tentang berbagai agama yang ada. Alih-alih mengajarkan nilai-nilai atau ajaran tertentu menurut agama yang dianut oleh masing-masing siswa, model pendidikan agama *non-confessional* akan menekankan nilai-nilai universal yang dikandung oleh berbagai agama.

## 3. Negara dan Kebijakan Pendidikan Agama

Perdebatan tentang pendidikan agama dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk dinamika politik atau persaingan antar kelompok ideologi dalam suatu negara (Kuru, 2009). Oleh karena itu, karena besarnya pengaruh domestic politik, fokus pertentangan antar kubu atau kelompok terkait pendidikan agama di sekolah negeri dapat berbeda antar negara. Di Amerika Serikat, misalnya, pertentangan melibatkan persaingan antara pendukung sekularisme pasif yang menginginkan

peran netral negara dalam urusan pendidikan agama dengan beberapa kelompok konservatif keagamaan yang menginginkan peran yang lebih besar bagi agama dalam sekolah negeri. Berbeda dengan Amerika Serikat, pertentangan yang terjadi di Turki melibatkan persaingan antara pendukung *laicite*, yang secara aktif berupaya mengeluarkan agama dari ruang publik, dengan pendukung 'netral-agama' yang menginginkan peran negara yang lebih netral sehingga membuka ruang bagi ekspresi keagamaan warga di ruang-ruang publik, termasuk sekolah negeri (Kuru, 2009).

Dalam suatu negara, perbedaan sikap juga dapat terjadi antar isu. Satu kelompok tertentu bisa jadi bersikap akomatif terhadap peran agama di satu isu tetap menunjukkan sikap berseberangan di persoalan lain. Oleh karena, diperlukan cara pandang yang lebih luas dan mendetail tentang isu- isu penting dalam pendidikan agama dan bagaimana seseorang atau pengambil kebijakan akan bersikap dalam isu-isu tersebut. Selain itu, mengingat pentingnya pengaruh dinamika politik internal dalam suatu negara, peneliti juga perlu melihat lebih jauh kesesuaian perangkat metodologis yang digunakan untuk memotret pandangan seseorang tentang kebijakan pendidikan agama dengan variasi pandangan agama dan politik yang ada di negara tersebut.

Fleksibilitas atau kontekstualisasi perangkat metodologis sebagaimana dikemukakan di atas sangat diperlukan untuk mengkaji kebijakan pendidikan agama di negara yang banyak mengalami pergeseran dalam hubungan agama dan negara seperti Indonesia. Sebagaimana telah didokumentasikan oleh banyak peneliti, dinamika politik pada masa-masa awal pembentukan negara menghasilkan Indonesia sebagai negara yang dalam banyak hal 'bersahabat dengan agama.' Meski Indonesia bukan negara agama, namun Indonesia juga bukan negara sekuler. Beberapa ketentuan dalam konstitusi dan peraturan-peraturan lain serta lembaga-lembaga negara jelas memberi pengakuan serta ruang yang besar bagi agama dalam kehidupan negara. Terkait dengan pendidikan, negara memfasilitasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri. Lebih dari itu, negara terlibat aktif dalam memfasilitasi penyelenggaraan sekolah keagamaan melalui satu kementerian tertentu, yakni Kementerian Agama (Ropi, 2017).

Oleh karena itu, tanpa mengingkari spektrum luas hubungan agama dan negara sebagaimana telah disebutkan di atas, penelitian tentang politik kebijakan pendidikan agama di Indonesia ini dapat difokuskan pada empat pilihan politik yang mungkin ada, yakni '*laicite*', 'netral-agama', 'akomodasionis', dan 'negara agama'. Terkait dengan hal ini, model-model kebijakan pendidikan agama sebagaimana didiskusikan dalam bagian sebelumnya juga dapat dikategorikan kembali dengan memperhatikan keempat posisi politik tersebut.

Dalam penelitian ini, kami melihat lebih lanjut pada perbedaan posisi yang ada dalam model pendidikan *confessional religious education*. Bagaimana atau sejauh mana agama diajarkan sedikit banyak akan dipengaruhi pandangan keagamaan yang dianut oleh guru yang mengajar atau secara lebih mendasar dipengaruhi oleh kebijakan

agama negara atau pemerintah yang berkuasa. Terkait dengan politik hubungan antara agama dan negara seperti yang telah didiskusikan di atas, *confessional religious education* secara teoretik dapat dibedakan lebih lanjut ke dalam dua model besar sebagai berikut: intervensionis dan akomodasionis.

Model pertama atau intervensionis adalah model pendidikan yang dibangun atas kesadaran bahwa agama dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kerangka hubungan negara dan agama seperti yang telah disebutkan di atas, cara pandang ini mewakili mereka yang menginginkan peran maksimal agama dalam negara sebagaimana ditemukan dalam negara-agama. Dalam negara seperti ini, pendidikan agama terkait erat dengan kepentingan untuk mempertahankan peran agama dalam negara. Dari sudut pandang pihak yang berkuasa, pilihan kebijakan ini sangat masuk akal karena pemerintah atau rezim yang berkuasa perlu menyebarkan nilai-nilai agama yang mendukung kekuasaan mereka. Sesuai dengan sifatnya, model pendidikan agama seperti ini dapat kita sebut sebagai model pendidikan agama yang intervensionis.

Model pendidikan agama intervensionis dapat ditemukan bukan hanya pada negara-agama namun juga pada negara yang tidak didasarkan pada agama. Untuk kasus terakhir, keinginan untuk meraih atau mempertahankan dominasi politik dapat membuat suatu kelompok keagamaan tertentu menggunakan kebijakan negara sebagai instrumen kekuasaan. Akibatnya, terkait dengan pendidikan agama, model pendidikan agama yang diterapkan dapat mengambil bentuk atau model pendidikan agama intervensionis, yang akan memberikan keistimewaan bagi kelompok agama mayoritas untuk meraih atau mempertahankan dominasi politik dalam negara tersebut.

Berbeda dengan model pendidikan intervensionis, negara dapat memilih model kebijakan lain yang lebih menghargai perbedaan atau keragaman agama dalam masyarakat. Jadi, meski pendidikan agama yang diberikan tetap bertujuan untuk memberikan pemahaman nilai-nilai agama tertentu kepada siswa, negara tidak memberikan keistimewaan kepada satu kelompok atau agama tertentu. Sebaliknya, sekolah atau negara menyediakan ruang yang sama bagi semua kelompok agama yang ada untuk memberikan atau mendapat pendidikan agama sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Peran utama negara atau pendidikan agama adalah memfasilitasi, bukan melakukan intervensi atau doktrinasi pandangan agama tertentu terhadap para siswa. Model pendidikan ini sering dikenal sebagai model kebijakan pendidikan agama yang akomodasionis. Dalam perspektif hubungan antara agama dan negara, model pendidikan agama akomodasionis ini merepresentasikan sikap atau pandangan politik yang 'akomodatif' atau bersahabat dengan agama.

Berbeda dengan model *confessional religious education*, model pendidikan tentang atau dari agama banyak hal berkesesuaian dengan pandangan yang menekankan peran netral negara dalam urusan agama. Karena negara tidak mengutamakan salah satu agama tertentu, maka jalan keluar yang paling masuk akal adalah mengajarkan

nilai-nilai universal keagamaan yang mungkin bisa diambil dari setiap agama yang ada di sekolah atau masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, model pendidikan tentang atau dari agama tidak menekankan perlunya melakukan internalisasi nilai-nilai agama tertentu pada diri siswa. Sebaliknya, pendidikan agama lebih dimaksudkan untuk memperkenalkan siswa terhadap beragam agama yang ada sehingga siswa dapat mengambil pelajaran dari nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama. Paling tidak, siswa dapat lebih memahami heterogenitas agama yang ada.

Akhirnya, diskusi tentang pendidikan agama tidak akan sempurna tanpa memperhitungkan posisi mereka yang menolak pendidikan agama atau hal-hal terkait agama di sekolah-sekolah negeri. Bagi kelompok ini, agama dipandang sebagai hal privat yang tidak semestinya negara ikut campur di dalamnya. Oleh karena itu, mereka menolak pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri. Pendidikan agama sebaiknya diberikan oleh keluarga atau masyarakat, bukan oleh pemerintah atau negara. Pandangan ini sejalan dengan cara pandang *laicite* dalam hubungan agama dan negara. Dalam penelitian ini, kami menyebutnya sebagai sikap enggan terhadap peran negara dalam pendidikan agama. Dalam konteks ini, sikap enggan ini mungkin diwujudkan dalam bentuk keinginan untuk mengurangi porsi pendidikan agama atau menghapuskannya di sekolah negeri.

Dalam beberapa hal, mereka yang mendukung netralitas negara dalam urusan agama mungkin juga setuju untuk mengurangi atau meniadakan pendidikan agama di sekolah karena penyediaan layanan pendidikan agama pada kelompok agama tertentu dapat dilihat sebagai kecenderungan negara untuk mendukung kelompok agama tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan *laicite*, yang secara aktif ingin mengeluarkan agama dari sekolah negeri atau wilayah public pada umumnya, sikap atau pandangan netral-agama masih membuka ruang bagi ekspresi keagamaan siswa atau guru. Seperti disebutkan sebelumnya, posisi netral-agama tidak sepenuhnya menolak hal-hal terkait agama di lingkungan sekolah. Penganjur posisi politik ini masih dalam tingkat tertentu masih dapat menerima ekspresi keagamaan tertentu di lingkungan sekolah.

## **b. Kerangka Analisis**

Untuk menjelaskan variasi kecenderungan sikap anggota DPR RI dalam merumuskan kebijakan pendidikan agama, ada dua hal yang akan kami bahas dalam laporan ini. Pada bagian pertama, laporan ini akan menjelaskan variasi pandangan anggota DPR RI tentang persoalan-persoalan penting dalam pendidikan agama dan kebijakan pendidikan agama berdasarkan afiliasi partai politik dan kondisi sosial demografi masing-masing anggota DPR RI. Kondisi sosial demografi ini mencakup hal-hal seperti agama, gender, asal wilayah, kondisi sosial lingkungan tempat tinggal khususnya terkait dengan heterogenitas agama dan suku, serta usia masing-masing anggota responden.

Kedua, dalam analisis yang lebih lanjut, laporan ini akan melihat lebih jauh faktor yang menjelaskan perbedaan antar partai terkait perbendaan pandangan para wakilnya di DPR RI dalam hal peran agama dalam kebijakan pendidikan agama. Hal ini akan bermanfaat bukan hanya untuk memahami lebih jauh variasi pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama, melainkan juga untuk memahami sejauh mana pandangan tersebut berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia. Untuk tujuan ini, laporan ini secara spesifik akan melihat dua hal, yakni identitas politik partai dan komposisi sosial-keagamaan partai di Indonesia. Kajian ini ingin menguji mana di antara kedua hal tersebut yang bisa menjelaskan dengan lebih baik peta pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa agama memiliki pengaruh besar dalam pembentukan sistem kepartaian di Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah kalangan, sistem kepartaian di negara ini pertama kali terbentuk melalui pemilu 1955, di mana partai-partai agama memainkan peran yang cukup signifikan. Empat partai terbesar waktu itu, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI, masing-masing mewakili golongan terbesar dalam sistem ideologis dan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, dengan dua di antaranya mewakili dua kelompok sosial keagamaan terbesar yang ada. Jika PNI dan PKI mewakili kelompok nasionalis (dan priyayi) dan komunis (dan kelas bawah), Masyumi dan NU mewakili kelompok Muslim modernis dan Muslim tradisional. Penghancuran PKI oleh rezim Orde Baru tidak serta merta menghancurkan keberadaan sistem kepartaian tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Dwight King (2003), Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama setelah runtuhnya rezim Orde Baru, menunjukkan pengelompokan partai politik dan pemilih seiring dengan garis pengelompokan sistem kepartaian Pemilu 1955, terkecuali dengan tidak adanya PKI dalam Pemilu 1999.

Dalam beberapa hal, sistem kepartaian Indonesia mengalami perubahan seiring dengan diterapkannya sistem 'Daftar Terbuka' (*Open List*) dalam pemilihan anggota DPR RI. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa sistem ini berpengaruh besar pada berkurangnya peran partai politik dalam mengagregasikan suara pemilih karena persaingan dalam pemilu legislatif kini tidak hanya melibatkan persaingan antar partai politik melainkan juga persaingan antar kandidat dalam satu partai politik. Selain itu, muncul dan tenggelamnya partai baru disertai maraknya politik uang dalam pemilu juga turut menggerus sistem kepartaian yang ada, sehingga hubungan antara pemilih dan partai politik menjadi lebih cair dan pengaruh ideologi juga menjadi berkurang (Ufen, 2008). Muhtadi (2019) juga menemukan bahwa identitas kepartaian di kalangan pemilih terus mengalami penurunan semenjak masa reformasi.

Namun demikian, meski sistem kepartaian telah banyak mengalami pergeseran, pengaruh agama tetap terlihat besar dalam pengelompokan partai politik di Indonesia. Penelitian Fossati, Aspinall, Muhtadi and Warburton (2020) menunjukkan bahwa tidak ada isu lain yang memiliki peran signifikan dalam membedakan posisi ideologis partai-partai politik selain isu agama. Akan tetapi, bagaimana hal ini terjadi, atau bagaimana agama berpengaruh dalam pembentukan identitas atau ideologi partai belum mendapatkan pembahasan

yang proporsional. Laporan ini bermaksud mengisi kekosongan ini dengan menguji dua mekanisme bagaimana pengaruh agama dalam sistem kepartaian turut mempengaruhi peta pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama. Pertama, laporan ini akan melihat bagaimana antara identitas kepartaian turut mempengaruhi peta pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan. Kedua, sebagai alternatif penjelasan, kajian ini juga akan melihat sejauh mana komposisi sosial keagamaan partai (*religious cleavage*) dapat menjelaskan peta pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama.

Kedua hal tersebut sama-sama melihat pengaruh afiliasi partai politik terhadap pandangan seseorang terhadap pendidikan agama. Akan tetapi, mereka berbeda dalam melihat bagaimana pengelompokan partai tersebut sebaiknya dilakukan. Mekanisme pertama mengasumsikan bahwa sejauh mana partai meletakkan agama atau bangsa sebagai faktor penentu utama yang membentuk pandangan politik partai. Ini tidak berarti menyatakan bahwa mereka yang meletakkan agama di atas bangsa sebagai faktor utama pembentuk identitas partai tidak memiliki komitmen kebangsaan, atau sebaliknya mereka yang menjadikan bangsa sebagai pembentuk utama identitas partai sebagai tidak memiliki komitmen keagamaan. Akan tetapi, perbedaan tersebut lebih merujuk pada sejauh mana agama atau bangsa menjadi hal yang lebih dikedepankan dalam membentuk identitas partai.

Sejalan dengan asumsi ini, kajian ini akan mengelompokkan partai berdasarkan pada sejauh mana agama atau bangsa membentuk identitas partai. Berdasarkan pada sejarah sosial partai, garis kebijakan partai sebagaimana tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta survei yang pernah dilakukan terhadap para elit partai, laporan ini mengelompokkan partai yang ada menjadi empat kelompok, yakni Nasionalis, Nasionalis-Religius, Islam Tradisionalis dan Islam Modernis. Jika dua nama pertama mencakup partai-partai yang mengedepankan bangsa di atas dalam membentuk identitas partai, dua kelompok terakhir sebaliknya mencakup partai-partai yang mengutamakan agama di atas bangsa dalam membentuk identitas partai.

Terkait dengan partai-partai keagamaan, laporan ini membedakan mereka menjadi Islam Tradisionalis dan Islam Modernis berdasarkan perbedaan pandangan keagamaan yang dimiliki oleh kelompok sosial agama utama yang membentuk partai tersebut. Islam Tradisionalis mencakup Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dibentuk oleh kelompok NU yang secara keagamaan berpandangan tradisionalis. Sebaliknya, Islam Modernis mencakup Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kelompok utama pembentuk partai-partai ini berasal dari kalangan Islam Modernis, yang secara pandangan keagamaan berkecenderungan lebih puritan dibandingkan dengan kelompok Islam tradisionalis.

Kami memasukkan PPP dalam kategori ini mengingat besarnya pengaruh unsur Masyumi yang beraliran Islam Modernis dalam pembentukan partai, terlebih setelah NU menyatakan keluar dari PPP beberapa saat setelah pembentukan partai. Memang benar bahwa saat ini banyak petinggi partai ini yang berasal dari kalangan NU. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan hasil survei yang dilakukan oleh

Fossati, Aspinall, Muhtadi and Warburton (2020) –yang menunjukkan bahwa partai memiliki pandangan politik keagamaan yang cenderung konservatif, cenderung sama konservatifnya dengan PKS atau PAN—menunjukkan besarnya pengaruh pandangan keagamaan Islam Modernis dalam PPP. Sementara itu, PKS dan PAN dapat dimasukkan dalam kategori Islam Modernis mengingat karakter pandangan keagamaan yang menjadi pembentuk utama kedua partai ini. Jika pembentukan PAN dimotori oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, pembentukan PKS dibidani oleh mereka yang banyak bergerak dalam gerakan-gerakan dakwah kampus yang secara ideologis dekat dengan Ikhmanul Muslimin.

Dalam kelompok partai Nasionalis, kami memasukkan dua partai yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai NasDem. Kedua partai ini secara eksplisit menyebutkan bangsa atau nasion sebagai sebagai hal utama dalam membentuk pandangan-pandangan politik mereka. Sedikit berbeda dengan kelompok Nasionalis, kelompok Nasionalis-Religius berusaha memasukkan gagasan keagamaan dalam pandangan diri nasionalis mereka. Dalam hal ini, kami memasukkan tiga partai, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat dan Partai Golkar dalam kelompok Nasionalis-Religius. Jika Gerindra dan Demokrat secara eksplisit menyatakan kecenderungan Nasionalis-Religius tersebut dalam AD/ART mereka, Golkar menunjukkan kecenderungan ideologis ini bukan hanya dalam struktur kepartaian melainkan juga dalam kegiatan atau sikap politik partai, yang banyak mengakomodir kepentingan kelompok keagamaan. Survei Fossati, Aspinall, Muhtadi and Warburton (2020) menunjukkan bahwa sejauh menyangkut hubungan antara agama dan negara, Gerindra, Demokrat dan Golkar cenderung memiliki pandangan politik yang berdekatan, yang cenderung lebih konservatif dibandingkan dengan pandangan politik para elit PDI Perjuangan dan NasDem.

Berbeda dengan model pengelompokan partai berdasarkan identitas politik, model pengelompokan partai berdasarkan pada perbedaan agama (*religious cleavage*) lebih melihat pada komposisi agama dalam elit partai. Dalam konteks Indonesia, *religious cleavage* ini secara sederhana dapat didefinisikan berdasarkan seberapa banyak proporsi elite partai, dalam penelitian ini berarti anggota DPR RI, yang beragama selain Islam. Meski penelitian ini mendapatkan *response rate* hanya sebesar 64,6 persen –lebih lanjut tentang *non-response rate* ini akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya—*non-response rate* tersebut bersifat acak sehingga data yang terkumpul dapat dianggap mewakili keseluruhan anggota DPR RI. Terkait dengan agama, komposisi agama yang digambarkan oleh hasil survei ini menggambarkan komposisi agama yang sebenarnya dalam setiap partai, kecuali Partai Demokrat.

Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 berikut, tidak ada perbedaan yang berarti antara komposisi agama partai yang ada dalam DPR RI dengan komposisi agama yang ditunjukkan oleh hasil survei ini, terkecuali untuk Partai Demokrat. Misalnya, survei PPIM menunjukkan bahwa proporsi non-Muslim dalam PDI Perjuangan adalah 48.68 persen sementara proporsi sesungguhnya di DPR RI adalah 44.53 persen. Hasil survei

ini juga tidak menunjukkan perbedaan berarti antara proporsi non-Muslim dalam elit PAN di DPR RI (4.54 persen) dengan proporsi anggota DPR RI dari PAN yang beragama non-Muslim yang bisa diwawancarai oleh enumerator survei PPIM (5.88 persen).

Tabel 1.  
Proporsi Elit Partai yang Beragama Selain Islam

No.	Nama Partai	Proporsi Non-Muslim (DPR RI)	Proporsi Non-Muslim (Survei PPIM)	Kategori Partai
1.	PDI Perjuangan	44.53	48.68	Sangat Heterogen
2.	NasDem	20.34	20.51	Heterogen
3.	Golkar	12.94	15.91	Heterogen
4.	Gerindra	7.69	6.38	Agak Heterogen
5.	Demokrat	12.96	6.25	Agak Heterogen
6.	PAN	4.54	5.88	Agak Heterogen
7.	PKB	5.17	3.85	Agak Heterogen
8.	PKS	0	0	Homogen
9.	PPP	0	0	Homogen

Sumber: Survei PPIM

Berdasarkan variasi dalam proporsi anggota DPR RI yang beragama selain Islam dalam setiap partai, laporan ini lebih lanjut mengelompokkan partai-partai yang ada ke dalam empat kategori. Kategori pertama adalah 'Sangat Heterogen'. Ini merujuk pada partai yang memiliki proporsi non-Muslim sangat tinggi dalam elit partai (> 40 persen). Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di atas, hanya ada satu partai yang masuk dalam kategori ini, yakni PDI Perjuangan. Kategori kedua adalah partai-partai yang memiliki proporsi non-Muslim yang tinggi dalam elite partai (>15 persen namun < 40 persen). Termasuk dalam kategori ini adalah NasDem dan Golkar. Kategori ini dapat disebut sebagai partai 'Heterogen'. Kategori ketiga adalah partai-partai yang memiliki hanya sedikit elit partai yang beragama selain Islam (>3 persen namun < 15 persen). Kelompok ini dapat disebut sebagai kelompok 'Agak Heterogen' dan mencakup empat partai, yakni Gerindra, Demokrat, PAN dan PKB. Terakhir, terdapat dua partai yang tidak memiliki anggota non-Muslim dalam elit partai. Keduanya adalah PKS dan PPP. Dalam laporan ini, keduanya dikategorikan sebagai partai yang 'Homogen'. Penelitian ini akan melihat lebih lanjut bagaimana perbedaan jenis partai ini mempengaruhi pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama.

## Metode Penelitian

Laporan ini didasarkan pada survei lengkap atau sensus terhadap anggota DPR RI periode 2019-2024, yang berjumlah 575 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan setiap responden. Data dikumpulkan oleh enumerator terlatih pada periode 21 Oktober – 17 Desember 2019 dengan *response rate* sebesar 68,1%. Dengan kata lain, penelitian ini berhasil mewawancari 380 data anggota DPR RI. Untuk menjamin kualitas data, penelitian ini melakukan mekanisme *spot check* sebanyak 100% dari data yang didapatkan. Dari data yang telah didapatkan, sebanyak 10 data tidak lengkap, sehingga data yang dianalisis sebanyak 370 (64,6%).

Secara metodologi, studi ini dapat dikategorikan sebagai survei elit. Mereka yang diwawancari adalah para elit politik, yang memiliki karakteristik sosial dan demografi tersendiri, yang berbeda dengan karakteristik sosial dan demografi masyarakat pada umumnya. Untuk survei elit, para ahli menyatakan bahwa *response rate* sebesar 64,6% masih bisa diterima. Namun demikian, untuk memastikan lebih lanjut bahwa data yang kami kumpulkan memang berkualitas dan dapat diandalkan, kami mengkaji lebih lanjut apakah nonresponse dalam survei ini bersifat acak atau tidak. Untuk itu, kami melakukan beberapa pengujian dengan memeriksa perbedaan proporsi ataupun rata-rata pada beberapa variabel. Pertama, kami menggunakan beberapa variabel yang telah tersedia, yaitu jenis kelamin dan umur anggota DPR RI, untuk mengecek sejauh mana *non-response rate* dalam survei ini mempengaruhi hasil analisis. Kedua, kami juga memeriksa perbedaan proporsi dan/atau rata-rata pada variabel partai politik.

Terkait dengan jenis kelamin dan umur, hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% tidak ada perbedaan signifikan tentang proporsi berdasar jenis kelamin antara anggota legislatif yang merespons atau diwawancarai (370 orang) dan total anggota DPR RI periode 2019-2024 (575 orang). Demikian juga jika dilihat menurut umur anggota legislatif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata umur anggota legislatif yang merespons dan total anggota legislatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *non-response* menyebar secara acak (menurut variabel jenis kelamin dan umur).

Hasil yang sama juga diperoleh jika pengujian dilakukan pada setiap kelompok partai. Pada setiap partai, diketahui bahwa tidak ada perbedaan signifikan tentang proporsi menurut jenis kelamin dan rata-rata umur antara anggota legislatif yang merespons dan total anggota legislatif. Dapat disimpulkan juga bahwa *non-response* juga menyebar secara acak di setiap kelompok partai (menurut variabel jenis kelamin dan umur). Dengan demikian, berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *non-response* dalam penelitian ini menyebar secara acak. Oleh karena itu, secara statistik dapat dikatakan bahwa bias *non-response* yang terjadi relatif kecil.

## Gambaran Umum Subjek Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, survei ini mencakup 370 orang dari 575 orang anggota DPR RI. Berdasarkan uji statistik yang kami kemukakan di atas, secara demografi tidak ada perbedaan signifikan antara kondisi sosial demografi responden survei ini dengan kondisi sosial demografi anggota DPR RI. Sesuai dengan proporsi anggota legislatif perempuan di DPR RI (2019-2024), yang sebesar 20,5 persen atau berjumlah 118 dari 575 orang, proporsi responden perempuan dalam survei ini mencapai 21 persen. Dari 370 orang anggota legislatif yang berhasil diwawancarai, 78 orang adalah perempuan. Secara agama, proporsi responden non-Muslim juga sejalan dengan proporsi anggota DPR RI yang beragama selain Islam. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2, sebanyak 61 responden (16,49 persen) beragama selain Islam. Angka ini juga merefleksikan proporsi anggota legislatif yang beragama selain Islam di DPR RI, yakni sebesar 17,03 persen (98 dari 575 orang).

Tabel 2.  
Komposisi Responden Berdasarkan Agama/Kepercayaan yang Dianut

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	309	83,51
2.	Kristen Protestan	28	7,57
3.	Kristen Katolik	19	5,14
4.	Hindu	9	2,42
5.	Buddha	4	1,08
6.	Agama/Kepercayaan Lain	1	0,27
Total		370	100

Sumber: Survei PPIM

Secara kepartaian, responden yang berhasil diwawancarai dalam survei ini berasal dari semua partai yang ada di DPR RI. Kecuali Partai Golkar, di mana survei ini hanya bisa mewawancarai 5,41 persen dari anggota DPR RI yang berasal dari partai ini, proporsi responden yang berhasil diwawancarai dari partai-partai berkisar antara 60,2 persen hingga 89,7 persen (tabel 3). Proporsi terbesar berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di mana survei ini berhasil mewawancarai 52 orang dari total 58 anggota DPR RI yang berasal dari partai ini (89,7 persen).

Tabel 3.  
Komposisi Responden Berdasarkan Afiliasi Partai Politik

No.	Nama Partai	Jumlah Wakil di DPR RI	Jumlah Responden	Proporsi Responden
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	44	34	77,3
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	128	77	60,2
3.	Partai Demokrat	54	35	64,8
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	78	47	60,3
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	85	46	54,1
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	50	33	66,0
7.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	58	52	89,7
8.	Partai NasDem	59	39	66,1
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19	17	89,5
Total		575	380	66,09

Sumber: Survei PPIM

Survei ini juga mencakup semua komisi yang ada. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4, proporsi anggota DPR RI yang dapat diwawancarai dari setiap komisi berkisar antara 52,94 persen hingga 78,43 persen. Komisi yang memiliki proporsi responden paling sedikit adalah Komisi I, yang membidangi masalah pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Sementara itu, komisi yang memiliki proporsi responden paling besar adalah Komisi IX, yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan. Terkait dengan fokus penelitian ini, yakni pendidikan agama, ada dua komisi yang terkait, yakni Komisi VIII dan Komisi X. Komisi VIII membidangi urusan agama, sosial, kebencanaan, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sementara Komisi X membidangi persoalan pendidikan, olah raga dan sejarah. Dalam Komisi VIII dan X, survei ini berhasil mewawancarai, secara berurutan, sebanyak 75,47 dan 67,31 persen anggota komisi.

Tabel 4.  
Komposisi Responden Berdasarkan Keanggotaan di Komisi

No.	Nama Komisi	Jumlah Anggota	Jumlah Responden	Proporsi Responden
1.	Komisi I	51	27	52,94
2.	Komisi II	50	33	66
3.	Komisi III	53	29	54,72
4.	Komisi IV	54	40	74,07
5.	Komisi V	52	32	61,54
6.	Komisi VI	54	32	59,26
7.	Komisi VII	51	33	64,71
8.	Komisi VIII	53	40	75,47
9.	Komisi IX	51	40	78,43
10.	Komisi X	52	35	67,31
11.	Komisi XI	51	29	56,86

Sumber: Survei PPIM

Lebih lanjut tentang komposisi sosial demografi survei ini, tabel 5 menunjukkan bahwa berdasarkan latar belakang suku, kelompok suku terbesar adalah Jawa. Sebanyak 32,43 persen responden menyatakan bahwa mereka berasal dari suku ini. Jika dilihat dari beberapa suku yang memiliki perwakilan cukup banyak di DPR RI, hasil survei ini menunjukkan bahwa empat suku terbesar memiliki wakil yang secara total menguasai sekitar 63,25 persen kursi di DPR RI. Selain Jawa, suku-suku ini adalah Sunda (12,43 persen), Melayu (6,49 persen), Batak (5,95 persen) dan Bugis (5,95 persen). Sementara itu, jika kita lihat lebih lanjut berdasarkan asal wilayah daerah pemilihan, sekitar 54,05 persen responden berasal dari wilayah Jawa, yang mencakup Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sisanya, atau 45,95 persen, berasal dari beragam daerah atau pulau di luar Jawa.

Tabel 5.  
Komposisi Responden Berdasarkan Latar Belakang Suku

No.	Nama Suku	Jumlah Responden	Proporsi Responden
1.	Aceh	9	2,43
2.	Ambon	6	1,62
3.	Arab	2	0,54
4.	Bali	9	2,43

No.	Nama Suku	Jumah Responden	Proporsi Responden
5.	Banjar	7	1,89
6.	Batak	22	5,95
7.	Betawi	11	2,97
8.	Bugis	22	5,95
9.	Dayak	7	1,89
10.	Jawa	120	32,43
11.	Madura	6	1,62
12.	Melayu	24	6,49
13.	Minang	15	4,05
14.	Papua	7	1,89
15.	Sasak	3	0,81
16.	Sunda	46	12,43
17.	Tionghoa	6	1,62
18.	Lainnya	48	12,97
<b>TOTAL</b>		370	100

Sumber: Survei PPIM

Berdasarkan usia, hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPR RI berusia antara 41 hingga 60 tahun. Sebagaimana terlihat dalam tabel 6, proporsi responden yang tergolong berada pada kategori usia ini berjumlah 66,22 persen dari total responden. Hanya sedikit anak muda, khususnya yang berumur kurang dari 41 tahun, yang masuk menjadi anggota DPR RI. Hasil survei ini menunjukkan bahwa proporsi responden yang berusia di bawah 41 tahun hanya sebesar 17,83 persen. Angka ini hanya sedikit lebih besar dibandingkan dengan proporsi mereka yang berusia 61 tahun lebih, yang mencapai 15,95 persen.

Tabel 6.  
 Komposisi Responden Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah Responden	Proporsi Responden
1.	<= 30 Tahun	18	4,86
2.	31 – 35 Tahun	16	4,32
3.	36 – 40 Tahun	32	8,65
4.	41 – 45 Tahun	49	13,24
5.	46 – 50 Tahun	70	18,92

No.	Kelompok Usia	Jumlah Responden	Proporsi Responden
6.	51 – 55 Tahun	72	19,46
7.	56 – 60 Tahun	54	14,59
8.	61 – 65 Tahun	30	8,11
9.	>= 66 Tahun	29	7,84
TOTAL		370	100

Sumber: Survei PPIM

### **Pandangan Anggota Dpr RI tentang Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama**

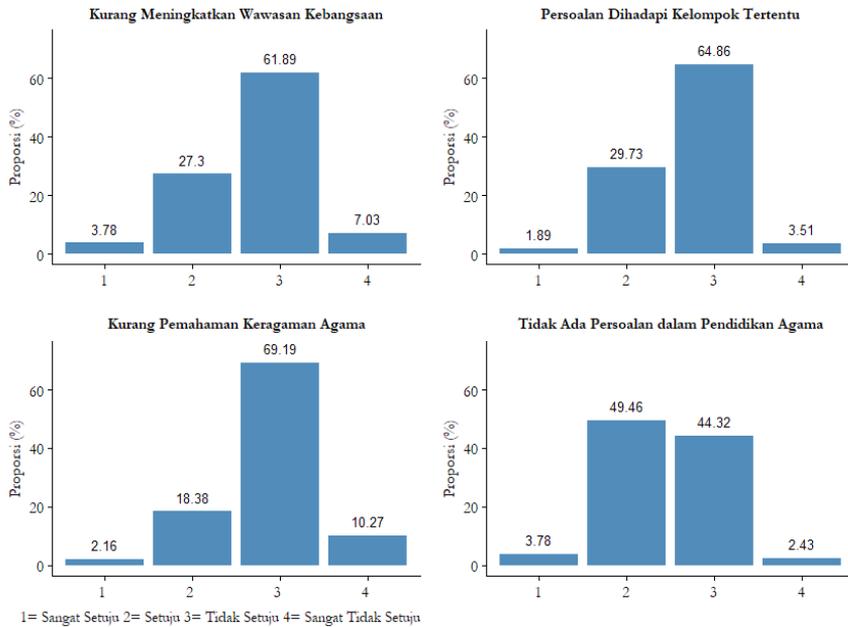
Bagian ini mendiskusikan pandangan anggota DPR RI tentang persoalan-persoalan krusial yang ada dalam pendidikan agama di sekolah negeri. Secara lebih spesifik, laporan ini menyoroti persoalan-persoalan krusial terkait dengan hubungan antar agama di Indonesia. Survei ini menanyakan seberapa jauh para responden setuju atau tidak setuju dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Materi pendidikan agama kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan;
2. Beberapa kelompok agama tertentu tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka ke dalam kurikulum pendidikan agama;
3. Pendidikan agama tidak memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia; dan

Selain itu, survei ini juga menanyakan pandangan anggota DPR RI tentang ada atau tidaknya persoalan penting dalam pendidikan agama di Indonesia. Selain untuk menggali pandangan umum anggota DPR RI tentang persoalan yang ada dalam pendidikan agama, pertanyaan ini dimaksudkan untuk melihat lebih lanjut sejauh mana persoalan-persoalan terkait peningkatan wawasan kebangsaan, pandangan keagamaan kelompok minoritas, dan pemahaman tentang keragaman agama mendapat perhatian khusus dari para anggota DPR RI.

Gambar berikut menunjukkan variasi pandangan anggota DPR RI tentang persoalan-persoalan penting dalam pendidikan agama. Terkait dengan pengembangan wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama, sekitar 30.08 persen responden survei ini menyatakan sangat setuju atau setuju bahwa pendidikan agama selama ini kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan. Sementara itu, sekitar 31.62 persen responden menyatakan sangat setuju atau setuju bahwa beberapa kelompok agama tertentu tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama. Proporsi responden yang sangat setuju atau setuju dengan pernyataan bahwa ada persoalan dalam pendidikan agama sedikit

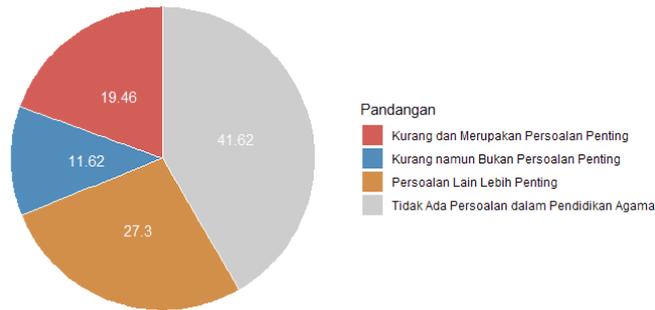
menurun ketika ditanyakan apakah pendidikan agama selama ini memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia. Hanya sekitar 20.54 persen responden menyatakan sangat setuju atau setuju bahwa pendidikan agama selama ini kurang memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia.



Gambar 2.  
Pandangan tentang Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama  
Sumber: Survei PPIM

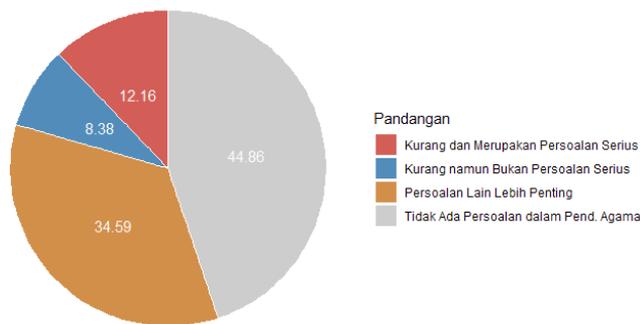
Namun demikian, ketika ditanyakan lebih lanjut apakah ada persoalan yang berarti dalam pendidikan agama di Indonesia, tidak semua responden yang menyatakan bahwa ada persoalan serius dalam pendidikan agama di Indonesia menganggap hal-hal tersebut sebagai bagian dari persoalan dalam pendidikan agama. Dari 370 orang anggota DPR RI yang menjadi responden survei ini, hanya 173 orang atau 46.75 persen responden menyatakan bahwa ada persoalan serius dalam pendidikan agama (lihat gambar bawah kanan di atas). Dari jumlah ini, hanya sebagian yang menyatakan bahwa kurangnya wawasan kebangsaan, sulitnya kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama, atau kurangnya pemahaman yang baik tentang keragaman agama sebagai persoalan penting dalam pendidikan agama di Indonesia.

Terkait dengan kurangnya peningkatan wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama, hasil survei ini menunjukkan bahwa dari total 370 responden, hanya sekitar 19,46 persen responden yang menyatakan bahwa kurangnya pendidikan agama dalam memberikan peningkatan wawasan kebangsaan peserta didik sebagai persoalan serius dalam pendidikan agama.



Gambar 3.  
Peningkatan Wawasan Kebangsaan dalam Pendidikan Agama  
Sumber: Survei PPIM

Sementara itu, terkait dengan masih adanya kelompok-kelompok tertentu yang masih menghadapi kesulitan dalam memasukkan pandangan keagamaan atau kepercayaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama, hasil analisis di atas juga menunjukkan bahwa dari total 370 responden, hanya sekitar 15,9 persen yang menganggap hal tersebut sebagai persoalan serius. Akhirnya, yang tidak kalah penting untuk dicatat adalah bahwa dari total 370 responden, hanya 12,16 persen responden yang menganggap kurangnya sekolah dalam memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia sebagai suatu persoalan serius dalam pendidikan agama.



Gambar 4.  
Keragaman Agama di Indonesia dalam Pendidikan Agama  
Sumber: Survei PPIM

Meski banyak kalangan telah menunjukkan munculnya sikap-sikap atau pandangan keagamaan yang intoleran di lingkungan sekolah, tidak banyak anggota DPR RI yang memandang persoalan kurangnya peningkatan wawasan kebangsaan, sulitnya kelompok tertentu dalam memasukkan pandangan keagamaan atau kepercayaan mereka dalam kurikulum, dan kurangnya pemahaman tentang keragaman agama di Indonesia sebagai persoalan serius dalam pendidikan agama. Proporsi responden yang menganggap kurangnya pendidikan agama memberikan peningkatan wawasan kebangsaan (19,5 persen), masih sulitnya kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan

atau kepercayaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama (15,9 persen), dan kurangnya pendidikan agama dalam memberikan pemahaman tentang keragaman agama sebagai persoalan serius (12,16 persen) jauh lebih kecil dibandingkan dengan proporsi responden yang menyatakan bahwa tidak ada persoalan serius dalam pendidikan agama (41.62 hingga 44.86 persen, tergantung persoalan yang ditanyakan).

Untuk memahami lebih lanjut pandangan anggota DPR RI tentang persoalan-persoalan terkait dengan pentingnya wawasan kebangsaan, akses kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama, dan pemahaman tentang keragaman agama di Indonesia, tabel berikut memaparkan hasil analisis regresi (logit) terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap pandangan anggota DPR RI tentang masalah-masalah tersebut. Dalam hal ini, untuk memudahkan pembahasan, variasi pandangan anggota DPR RI tentang wawasan kebangsaan, akses kelompok tertentu untuk memasukkan ajaran keagamaan mereka ke dalam kurikulum, dan pemahaman tentang keragaman agama disederhakan menjadi dua, yakni (1) mengakui ada masalah dan menganggapnya sebagai masalah serius; dan (2) sikap atau pandangan lain. Hasil analisis regresi kami tampilkan dalam tabel 7 berikut.

Tabel 7.  
 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Anggota DPR RI tentang Persoalan-Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama

	<b>Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Akses Kelompok Tertentu</b>	<b>Keragaman Agama</b>
Komisi	0.94 (0.33)	1.14 (0.45)	0.60 (0.24)
Demokrat	1.53 (1.24)	3.57 (4.18)	1.93 (2.45)
Gerindra	2.06 (1.54)	4.64 (5.18)	2.52 (2.94)
Golkar	1.20 (0.93)	4.48 (5.06)	3.89 (4.39)
NasDem	1.16 (0.94)	3.90 (4.49)	3.95 (4.66)
PAN	0.97 (0.86)	1.92 (2.43)	1.98 (2.52)
PDI Perjuangan	4.25* (3.00)	9.26* (10.03)	7.90# (8.66)
PKB	2.93 (2.07)	5.31 (5.81)	4.27 (4.71)
PKS	-	-	-

	Wawasan Kebangsaan	Akses Kelompok Tertentu	Keragaman Agama
PPP	0.48 (0.59)	6.19 (7.52)	4.56 (5.89)
Agama	0.56 (0.23)	0.58 (0.25)	0.98 (0.49)
Jawa	1.62 (0.53)	1.60 (0.53)	1.21 (0.45)
Agama Sangat Heterogen	0.14* (0.11)	0.13* (0.10)	0.26 (0.25)
Etnis Sangat Heterogen	3.95# (2.96)	4.95* (3.83)	4.75 (4.53)
N	370	370	370
<i>Log Likelihood</i>	-161.36	-148.88	-123.79
AIC	364.72	339.76	289.58

\*\*\*p<0.001; \*\*p<0.01; \*p<0.05; #p<0.1; Koefisien menunjukkan *odds ratio*

PKS menjadi *reference group*. Selain variabel-variabel di atas, analisis regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh usia dan jenis kelamin.

Sumber: Diolah dari hasil survei PPIM

Hasil regresi menunjukkan bahwa partai politik menjadi satu di antara sedikit faktor yang menjelaskan perbedaan sikap anggota DPR RI tentang persolan pending dalam pendidikan agama. Dalam semua model di atas, responden dari PDI Perjuangan memiliki kecenderungan 3,25 kali lipat hingga 9.26 kali lipat lebih besar dibandingkan responden dari PKS untuk menyatakan bahwa kurangnya wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama, sulitnya akses bagi kelompok tertentu untuk memasukkan ajaran keagamaannya dalam kurikulum, dan kurangnya pemahaman tentang keragaman agama di Indonesia merupakan masalah serius dalam pendidikan agama. Dalam model pertama (Wawasan Kebangsaan) dan kedua (Akses Kelompok Tertentu) pengaruh PDI Perjuangan secara statistik signifikan dengan tingkat signifikansi di bawah 0.05; namun dalam model terakhir pengaruh PDI Perjuangan secara statistik signifikan dengan tingkat signifikansi yang lebih rendah, yakni di bawah 0.1.

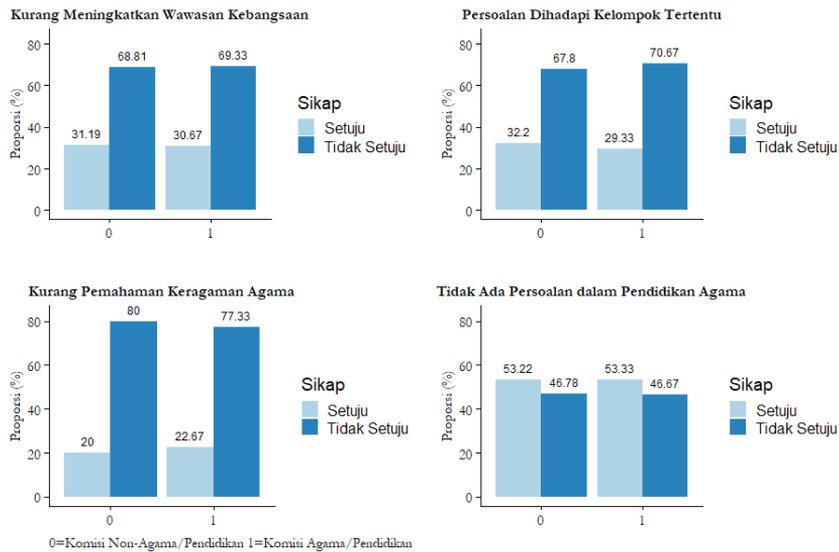
Selain partai politik, latar belakang pengalaman keberagaman juga mempengaruhi pandangan responden tentang persoalan-persoalan yang dianggap penting dalam pendidikan agama. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil regresi tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu dicatat tentang pengaruh pengalaman keberagaman ini. Pertama, dibandingkan dengan lingkungan yang secara sosial homogen, hanya kondisi lingkungan yang sangat heterogen yang berpengaruh terhadap pandangan responden. Sementara itu, mereka yang tinggal di wilayah dan homogen dan agak heterogen tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dalam penilaian mereka

terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam pendidikan terkait dengan wawasan kebangsaan, akses kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum dan pemahaman tentang keragaman agama di Indonesia.

Kedua, penting juga untuk dicatat bahwa heterogenitas etnis dan agama memiliki pengaruh yang berbeda dalam membentuk pandangan seseorang. Responden yang tinggal di daerah yang sangat heterogen secara etnis cenderung lebih sensitif terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam pendidikan agama, khususnya terkait pentingnya wawasan kebangsaan dan kesulitan yang dihadapi kelompok-kelompok tertentu. Dalam kasus wawasan kebangsaan, mereka yang tinggal di daerah yang sangat heterogen secara etnis memiliki kecenderungan hampir 3 kali lipat lebih besar –meski secara statistik hanya signifikan dengan  $p < 0.1$ —dibandingkan mereka yang tinggal di lingkungan yang homogen secara etnis untuk menyatakan bahwa pendidikan agama kurang memberikan wawasan kebangsaan dan menilai hal itu sebagai persoalan serius. Sementara dalam hal kesempatan untuk memasukkan pandangan keagamaan tertentu dalam kurikulum pendidikan agama, responden yang tinggal di lingkungan yang secara etnis sangat heterogen memiliki kecenderungan hampir 4 kali lipat lebih besar –dan secara statistik signifikan dengan  $p < 0.05$ —dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah yang homogen secara etnis.

Akan tetapi, berbeda dengan heterogenitas etnis, heterogenitas agama sebaliknya justru membuat seseorang untuk tidak sensitif terhadap kurangnya wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama dan kesulitan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama. Dalam persoalan terakhir, misalnya, mereka yang tinggal di lingkungan yang secara agama sangat heterogen justru berkecenderungan sekitar 87 persen lebih kecil dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah yang homogen secara agama untuk bisa melihat bahwa beberapa kelompok tertentu menghadapi kesulitan untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama.

Selain itu, hasil regresi di atas juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden yang berada di komisi-komisi yang menangani persoalan agama dan pendidikan (Komisi VIII dan Komisi XI) dengan responden yang berasal dari komisi-komisi lainnya. Hal ini secara sederhana dapat dilihat dalam tabulasi silang berikut. Sama seperti responden dari komisi-komisi lain, mereka yang berasal dari komisi-komisi yang menangani agama dan pendidikan, yakni Komisi VIII dan Komisi X, juga memiliki perhatian yang relatif rendah terhadap dengan hal-hal terkait wawasan kebangsaan, kesulitan yang masih dihadapi kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan atau kepercayaan mereka dalam kurikulum pendidikan, dan pemahaman tentang keragaman agama di Indonesia sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.



Gambar 5.  
Persoalan Krusial dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Komisi  
Sumber: Survei PPIM

## Agama, Politik dan Pandangan Anggota Dpr RI tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama

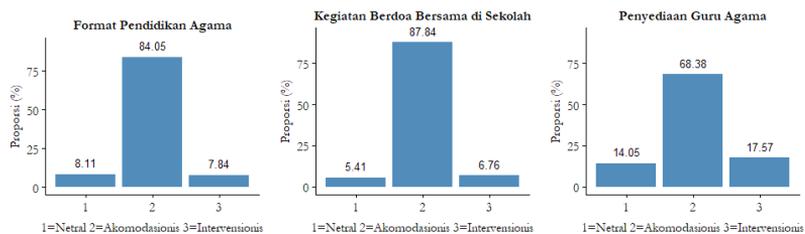
Bagian ini akan mendiskusikan pandangan anggota DPR RI tentang peran negara dalam pendidikan agama. Dalam sub-bagian pertama, kami akan mendiskusikan pandangan anggota DPR RI secara keseluruhan. Sementara itu, pada sub-bagian selanjutnya, laporan ini secara spesifik akan mendiskusikan pandangan politisi Muslim yang ada di DPR RI.

### a. Pandangan Anggota DPR RI tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama

Untuk memotret pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama, secara lebih spesifik penelitian ini menggunakan beberapa pertanyaan yang menanyakan hal-hal yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah. Hal ini mencakup penambahan durasi pelajaran agama, penambahan ruang kelas untuk pelajaran agama, pemasangan simbol-simbol keagamaan, kegiatan berdoa bersama di sekolah, ceramah keagamaan di sekolah, pengadaan buku agama, penyediaan guru agama, pelatihan guru agama dan sosok ideal guru agama. Setiap pertanyaan memberikan empat jawaban yang menggambarkan keragaman sikap politik mereka tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini membedakan orientasi seseorang dalam kebijakan pendidikan agama menjadi beberapa kategori, yakni enggan, netral, akomodasionis, dan intervensionis. Kami mencoba melihat keberadaan kategori ini dalam beberapa isu terkait pendidikan agama, seperti keberadaan guru, ruang kelas, kegiatan berdo'a bersama, dan pemangangan atribut atau simbol kegamaan di sekolah negeri. Mengingat variasi pandangan yang ada, terutama sedikitnya mereka yang meletakkan diri dalam kategori 'enggan' –terkecuali untuk satu pertanyaan tertentu— laporan ini menggabungkan kategori 'enggan' dan 'netral' ke dalam kategori 'netral' untuk memudahkan pembacaan hasil survei.

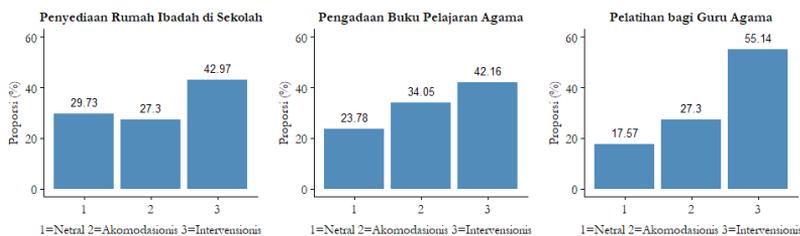
Hasil survei ini menunjukkan bahwa anggota DPR RI memiliki pandangan yang bervariasi untuk setiap kategori pertanyaan. Untuk pertanyaan tentang pendidikan agama secara umum, sebagian besar anggota DPR RI bersikap akomodasionis, yakni menekankan pentingnya negara untuk menyediakan pendidikan agama yang layak bagi setiap siswa sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Hanya sedikit sekali anggota DPR RI yang menunjukkan sikap intervensionis, yang mengutamakan kepentingan kelompok agama mayoritas, dalam hal pendidikan agama. Sangat sedikit juga yang bersikap 'netral' terhadap keberadaan pendidikan agama di sekolah negeri. Kecenderungan serupa juga ditemukan dalam hal-hal terkait penyelenggaraan kegiatan berdo'a bersama di sekolah dan penyediaan guru agama. Sebagaimana terlihat dalam gambar 6, kecenderungan akomodasionis mendominasi sikap responden dalam hal keberadaan pendidikan agama secara umum dan dalam penyelenggaraan berdo'a bersama di sekolah dan penyediaan guru agama.



Gambar 6.  
Kecenderungan Akomodasionis dalam Pendidikan Agama  
Sumber: Survei PPIM

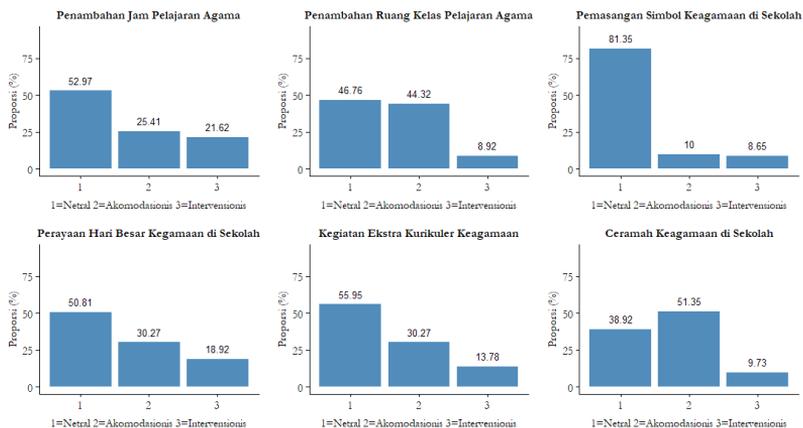
Akan tetapi, mayoritas responden menunjukkan sikap intervensionis dalam hal penyediaan rumah ibadah di sekolah negeri, pelatihan guru agama dan pengadaan buku pelajaran agama. Dengan kata lain, banyak anggota DPR RI yang setuju bahwa negara atau sekolah cukup memberikan perhatian kepada pihak mayoritas. Dalam konteks Indonesia, intervensionisme dalam hal penyediaan rumah ibadah dalam beberapa hal bisa dipahami mengingat perbedaan tata ritual antar agama. Sementara Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk mewajibkan pemeluknya untuk menjalankan sholat pada siang hari (sholat Dzuhur dan Ashar) bagi siswa/siswi, tidak ada kewajiban serupa dalam agama lain.

Akan tetapi, tidak demikian halnya dalam pengadaan buku agama dan pelatihan bagi guru agama. Dalam hal ini, bersikap intervensionis berarti menjadikan agama sebagai sesuatu yang mengatur kehidupan siswa secara utuh atau menyeluruh. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut, sekitar 42,16 persen dan 55,13 persen responden, secara berurutan, menyatakan bahwa mereka mendukung pengadaan buku pelajaran agama dan pelatihan guru agama sebagai upaya untuk menjadikan agama sebagai sumber jalan hidup bagi para siswa. Cukup besarnya kecenderungan intervensionis ini dapat berpengaruh dalam budaya keagamaan di sekolah, mengingat agama mengandung beragam interpretasi yang dapat berbeda satu sama lain. Kecenderungan intervensionis dapat berakibat pada pengutamaan salah satu pemahaman agama tertentu di atas pemahaman yang lain.



Gambar 7.  
Kecenderungan Intervensionis dalam Pendidikan Agama  
Sumber: Survei PPIM

Namun demikian, menarik untuk dicatat bahwa untuk kebijakan-kebijakan lain, survei ini menemukan bahwa proporsi anggota DPR RI yang menyatakan sikap netral dalam kebijakan pendidikan sangat besar atau bahkan paling besar. Netral dalam hal ini berarti negara atau pemerintah memberi ruang bagi siswa atau warga untuk menunjukkan ekspresi keagamaannya tanpa negara ikut mengambil peran untuk memfasilitasinya kecuali untuk hal-hal yang bersifat umum atau berlaku untuk semua warga tanpa tergantung agama atau kepercayaan mereka. Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 8, kecenderungan ini ditemukan dalam hal penambahan jam pelajaran agama, penambahan ruang kelas pelajaran agama, pemasangan simbol keagamaan di sekolah, perayaan hari besar keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dan ceramah keagamaan. Sejalan dengan kecenderungan dalam persoalan terakhir (ceramah keagamaan di sekolah), dimana sekitar 38,92 persen menunjukkan kecenderungan netral, hampir sepertiga responden (32,97 persen) menyatakan bahwa sosok guru agama yang adalah mereka yang tidak hanya mengajarkan pelajaran agama yang baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut siswa, melainkan juga bisa mengajarkan materi dialog antar agama. Berdasarkan kerangka teoretik yang telah kami paparkan sebelumnya, hal ini menunjukkan kecenderungan untuk bersikap 'netral' dalam menggambarkan sosok ideal guru agama.



Gambar 8.  
 Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama  
 Sumber: Survei PPIM

Untuk menjelaskan variasi pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama, Tabel 8 menunjukkan hasil regresi terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap kecenderungan bersikap intervensionis dalam pendidikan agama. Dalam hal penyediaan buku pelajaran agama, hasil regresi menunjukkan bahwa afiliasi partai politik berpengaruh terhadap pandangan responden. Dibandingkan dengan responden dari PDI Perjuangan, responden dari PAN, PKS dan PPP memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk bersikap intervensionis daripada sikap netral. Dibanding responden dari PDI Perjuangan, responden dari PKS dan PPP memiliki kecenderungan hampir sembilan kali lipat lebih besar untuk bersikap intervensionis dari pada sikap netral dalam hal penyediaan buku pelajaran agama. Selain itu, responden dari PKS dan PPP juga memiliki kecenderungan hampir tiga setengah kali lipat lebih besar dibandingkan responden dari PDI Perjuangan untuk bersikap akomodasionis dari pada bersikap netral dalam hal penyediaan buku pelajaran agama.

Dalam hal pelatihan guru agama, hasil regresi menunjukkan bahwa responden dari PAN dan PKS memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk bersikap intervensionis dari pada sikap netral. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 8, responden dari PAN memiliki kecenderungan lebih dari enam kali lipat lebih besar dibandingkan dengan responden dari PDI Perjuangan untuk bersikap intervensionis dari pada bersikap netral dalam hal pelatihan guru agama. Sementara itu, dibandingkan dengan responden dari PDI Perjuangan, responden dari PKS dan PPP memiliki kecenderungan lebih dari tiga kali lipat lebih besar untuk bersikap intervensionis dari pada bersikap netral dalam pelatihan guru agama.

Tabel 8.  
Kecenderungan Intervensionis dalam Pendidikan Agama

	Penyediaan Buku Agama		Pelatihan Guru Agama	
	Intervensionis	Akomodasionis	Intervensionis	Akomodasionis
Komisi	0,89 (0,38)	0,82 (0,38)	2,01 (0,44)	1,87 (0,48)
Demokrat	1,14 (0,64)	1,94 (0,60)	1,41 (0,65)	2,59 (0,69)
Gerindra	2,03 (0,54)	0,91 (0,58)	2,07 (0,58)	1,44 (0,66)
Golkar	1,80 (0,55)	2,05 (0,54)	2,00 (0,56)	1,64 (0,63)
NasDem	2,03 (0,60)	2,57 (0,59)	0,85 (0,56)	1,14 (0,62)
PAN	5,00** (0,73)	3,06 (0,75)	6,15*** (0,84)	3,60 (0,92)
PDI Perjuangan	-	-	-	-
PKB	0,90 (0,50)	0,48 (0,53)	1,20 (0,51)	0,89 (0,59)
PKS & PPP#	8,69*** (0,73)	5,88** (0,74)	3,46* (0,73)	6,50** (0,76)
Agama	4,52*** (0,47)	2,19* (0,38)	1,48 (0,45)	0,95 (0,50)
Gender	1,68 (0,36)	2,03* (0,38)	0,28*** (0,46)	0,45* (0,50)
Jawa	0,44** (0,33)	0,64 (0,34)	0,50*** (0,34)	0,61 (0,38)
Agama Heterogen	2,31* (0,44)	3,74*** (0,48)	0,62 (0,49)	1,18 (0,54)
Agama Sangat Heterogen	9,30** (0,91)	3,97 (0,91)	1,22 (0,86)	0,20 (1,01)
Etnis Heterogen	0,29** (0,60)	0,16*** (0,62)	0,82 (0,62)	0,56 (0,66)
Etnis Sangat Heterogen	0,23 (0,91)	0,35 (0,88)	0,28 (0,90)	0,90 (0,93)
Konstan	0,43 (0,74)	0,55 (0,73)	7,63** (0,80)	2,86 (0,87)
AIC	791,01	791,01	747,17	747,17

\*\*\*p<0.01; \*\*p<0.05; \*p<0.1 Koefisien menunjukkan Relative Risk Ratio. Kedua model menjadikan PDIP sebagai kelompok referensi. Kedua model juga memasukkan kelompok umur sebagai variabel kontrol.

Analisis ini menggabungkan responden dari PKS dan PPP menjadi satu kelompok untuk melakukan estimasi statistik atas dampak afilias dengan kedua partai tersebut terhadap kecenderungan intervensionis dalam pendidikan agama. Dalam Model pertama, "Penyediaan Buku Agama", tidak ada responden dari PPP yang menunjukkan kecenderungan bersifat netral dalam penyediaan buku agama. Sementara itu, tidak ada responden dari PKS yang menunjukkan kecenderungan netral dalam pengadaan pelatihan bagi guru agama (Model kedua,

“Pelatihan Guru Agama”). Akibatnya, koefisien untuk kedua partai ini akan mengalami inflasi jika diestimasi secara terpisah. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan ini, kami menggabungkan responden kedua partai ini menjadi satu kelompok.

Sumber: Diolah dari Survei PPIM

Selain partai politik, faktor-faktor lain yang turut membentuk sikap intervensionis anggota DPR RI dalam penyediaan buku pelajaran agama dan pelatihan guru agama adalah agama, asal wilayah, dan kondisi sosial tempat tinggal. Hasil regresi menunjukkan bahwa dibandingkan responden yang beragama selain Islam, responden Muslim memiliki kecenderungan empat setengah kali lipat lebih besar untuk bersikap intervensionis dari pada netral dalam penyediaan buku agama. Sementara itu, dibandingkan dengan responden dari luar Jawa, responden dari Jawa memiliki kecenderungan lebih kecil untuk bersikap intervensionis dari pada netral dalam hal penyediaan buku agama. Dibandingkan mereka yang tinggal di daerah yang memiliki latar belakang etnis yang homogen, responden yang tinggal di daerah yang memiliki latar belakang etnis yang heterogen juga memiliki kecenderungan lebih kecil untuk bersikap intervensionis dari pada netral dalam penyediaan rumah ibadah.

Akan tetapi, berbeda dengan heterogenitas etnis, heterogenitas tempat tinggal secara agama ternyata justru meningkatkan kecenderungan seseorang untuk bersikap intervensionis dibandingkan bersikap netral. Table 8 menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di lingkungan yang heterogen secara agama memiliki kecenderungan lebih dari dua kali lipat lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal di lingkungan yang homogen secara agama untuk bersikap intervensionis dari pada netral dalam penyediaan buku pelajaran agama. Pengaruh positif agama dalam kecenderungan intervensionis meningkat seiring dengan semakin meningkatnya heterogenitas lingkungan tempat tinggal secara agama. Responden yang tinggal di lingkungan yang sangat heterogen secara agama memiliki kecenderungan lebih dari sembilan kali lipat lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal di lingkungan yang homogen secara agama untuk bersikap intervensionis dari pada netral dalam penyediaan buku pelajaran agama.

Namun demikian, pengaruh heterogenitas lingkungan tempat tinggal, baik secara agama maupun etnis, tidak berpengaruh terhadap pandangan responden tentang kebijakan pelatihan guru agama.

Lebih lanjut tentang pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama, Tabel 9 menunjukkan kecenderungan bersikap netral di kalangan anggota DPR RI. Dari beberapa wilayah kebijakan di mana kecenderungan netral mendapat dukungan yang cukup banyak, pandangan tentang sosok guru agama yang ideal dan penambahan jam pelajaran agama sedikit banyak memberikan gambaran tentang sejauh mana partai politik berpengaruh terhadap kecenderungan netral dalam kebijakan pendidikan agama.

Pertama, afiliasi partai politik kembali menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan sikap pandangan anggota DPR RI tentang sosok guru agama yang ideal. Dibandingkan dengan responden yang berasal dari PKS, responden dari Demokrat, Gerindra, Golkar, NasDem, PDI Perjuangan dan PKB memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk

bersikap netral dari pada intervensionis. Kecenderungan paling besar ditunjukkan oleh responden dari NasDem dan PDI Perjuangan. Dibandingkan dengan responden dari PKS, responden dari NasDem memiliki kecenderungan hampir 12 kali lipat lebih besar untuk bersikap netral dari pada intervensionis dalam menentukan tentang sosok guru agama yang ideal. Sedikit lebih kecil dibandingkan kecenderungan untuk bersikap netral pada responden dari NasDem, responden dari PDI Perjuangan memiliki kecenderungan lebih dari sembilan kali lipat lebih besar dibandingkan responden dari PKS untuk bersikap netral dari pada intervensionis dalam menentukan tentang sosok guru agama yang ideal.

Akan tetapi, untuk kebijakan penambahan jam pelajaran agama, hanya responden dari PDI Perjuangan yang menunjukkan perbedaan dengan responden dari PKS. Dibandingkan dengan kelompok responden terakhir, responden dari PDI Perjuangan memiliki kecenderungan lebih dari tiga kali lipat lebih besar untuk bersikap netral dari pada bersikap intervensionis dalam menyikapi usulan untuk menambah jam pelajaran agama.

Tabel 9.  
Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama

	Sosok Guru Agama Ideal		Penambahan Jam Pelajaran	
	Netral	Akomodasionis	Netral	Akomodasionis
Komisi	1,10 (0,41)	0,94 (0,36)	1,53 (0,36)	0,97 (0,39)
Demokrat	3,83* (0,80)	2,01 (0,63)	2,59 (0,69)	0,94 (0,76)
Gerindra	7,06** (0,80)	4,53** (0,63)	1,64 (0,63)	1,21 (0,65)
Golkar	4,71** (0,79)	4,14** (0,62)	1,34 (0,64)	0,81 (0,67)
NasDem	11,85*** (0,82)	3,58* (0,70)	1,80 (0,65)	0,46 (0,71)
PAN	0,62 (1,00)	2,12 (0,60)	1,40 (0,71)	1,68 (0,70)
PDI Perjuangan	9,35*** (0,75)	2,92* (0,62)	3,13* (0,65)	1,05 (0,71)
PKB	8,20*** (0,74)	2,36 (0,61)	0,99 (0,59)	0,52 (0,63)
PKS	-	-	-	-
PPP	2,54 (0,94)	2,11 (0,75)	0,80 (0,75)	0,47 (0,82)
Agama	0,38* (0,53)	1,63 (0,54)	0,13*** (0,78)	0,34 (0,85)
Agama Heterogen	1,40 (0,53)	0,62 (0,45)	2,63** (0,40)	2,10* (0,45)

	Sosok Guru Agama Ideal		Penambahan Jam Pelajaran	
	Netral	Akomodasionis	Netral	Akomodasionis
Agama Sangat Heterogen	0,35 (1,03)	0,51 (0,93)	3.43 (0,85)	2.81 (1,00)
Etnis Heterogen	0,35 (0,68)	0,47 (0,61)	0.96 (0,47)	2.18 (0,57)
Etnis Sangat Heterogen	0,53 (1,06)	0.96 (0,96)	0.97 (0,77)	0.92 (0,95)
Konstan	1,49 (1,07)	2,01 (0,95)	1.428 (1,04)	1.45 (1.17)
AIC	756,79	756,79	756,84	756.84

\*p<0.1; \*\*p<0.05; \*\*\*p<0.01. Koefisien menunjukkan Relative Risk Ratio

PDI Perjuangan menjadi reference group. Selain variabel-variabel di atas, analisis regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh usia dan jenis kelamin.

Sumber: Diolah dari Survei PPIM

## b. Pandangan Politisi Muslim di DPR RI tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama

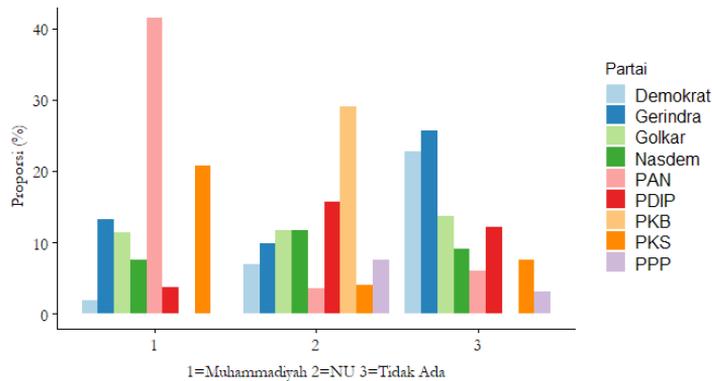
Dari 370 orang Anggota DPR RI yang berpartisipasi dalam survei ini, sebanyak 309 orang menyatakan beragama Islam. Bagian ini secara khusus ingin mendiskusikan kelompok ini, khususnya terkait pandangan mereka tentang pendidikan agama.

Penting untuk dicatat bahwa Islam sebagai agama memiliki tradisi keagamaan yang beragam. Di Indonesia, khususnya, dikenal ada dua jenis tradisi keagamaan yang memiliki pengaruh paling besar, yakni NU dan Muhammadiyah. Di luar kedua tradisi keagamaan ini, masih ada beberapa tradisi keagamaan Islam lain yang juga hidup di tengah masyarakat. Ini mencakup, antara lain, Nahdlatul Waton, al-Washliyah, al-Khairat, dan Tarbiyyah. Namun demikian, tidak sedikit juga Muslim yang tidak merasa dekat dengan organisasi ke-Islam-an manapun.

Di kalangan anggota DPR RI, khususnya mereka yang berpartisipasi dalam survei ini, NU dan Muhammadiyah menjadi dua tradisi keagamaan yang paling banyak diikuti atau dipraktikkan. Sekitar 46,49 persen responden mengaku dekat dengan tradisi keagamaan NU sementara sekitar 14,32 persen responden mengaku dekat dengan tradisi keagamaan Muhammadiyah. Sisanya, sekitar 4,86 persen mengaku dekat dengan tradisi keagamaan lainnya di luar NU dan Muhammadiyah, sementara sekitar 34,32 persen lainnya mengaku tidak dekat dengan tradisi keagamaan Islam manapun. Namun demikian, karena beberapa pertimbangan, terutama relatif kecilnya jumlah responden yang merasa dekat dengan tradisi keagamaan di luar Muhammadiyah dan NU dibandingkan dengan kelompok lain, laporan ini akan memfokuskan kajian pada mereka yang merasa dekat dengan Muhammadiyah dan NU dan mereka yang tidak merasa dekat dengan organisasi ke-Islam-an manapun.

Dengan batasan sebagaimana disebutkan di atas, Gambar 9 memperlihatkan persebaran politisi Muslim berdasarkan tradisi keagamaan yang mereka ikuti. Pertama, di antara

mereka yang mengaku dekat dengan tradisi keagamaan Muhammadiyah, PAN adalah partai politik yang paling banyak dipilih. Sekitar 41,51 persen responden yang mengaku dekat dengan Muhammadiyah berafiliasi dengan PAN. Setelah PAN, PKS (20,75 persen) menjadi partai politik kedua yang menjadi pilihan responden yang dekat dengan tradisi Muhammadiyah. Selain keduanya, banyak responden yang mengaku dekat dengan tradisi Muhammadiyah memilih berafiliasi dengan Gerindra dan Golkar. Secara berurutan, sekitar 13,21 persen dan 11,32 persen responden yang merasa dekat dengan tradisi keagamaan Muhammadiyah menjadikan Gerindra dan Golkar sebagai rumah politik mereka.



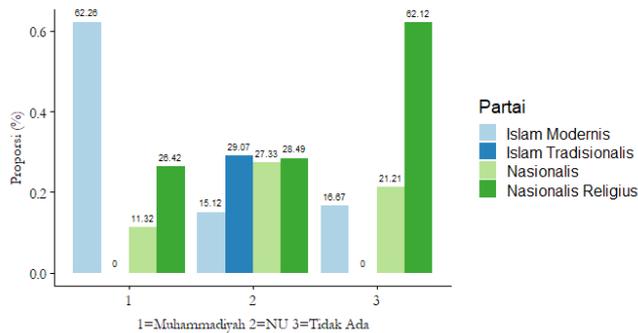
Gambar 9.  
Persebaran Politisi Muslim di DPR RI  
Sumber: Survei PPIM

Berbeda dengan responden yang mengaku dekat dengan Muhammadiyah, mereka yang mengaku dekat dengan tradisi keagamaan NU paling banyak berafiliasi dengan PKB dan PDI Perjuangan. Sekitar 29,1 persen responden yang merasa dekat dengan NU berafiliasi dengan PKB, sementara sekitar 15,7 persen lainnya berafiliasi dengan PDI Perjuangan. Selain kedua partai tersebut, NasDem dan Golkar menjadi partai politik yang banyak dipilih oleh responden yang merasa dekat dengan NU, di mana masing-masing menjadi rumah politik sekitar 11,63 persen mereka yang merasa dekat dengan tradisi keagamaan NU.

Sementara itu, mereka yang menyatakan tidak dekat dengan tradisi Islam manapun menyatakan bahwa, secara berurutan, Gerindra, Demokrat dan Golkar merupakan afiliasi politik mereka. Sekitar 25,76 persen responden yang menyatakan tidak dekat dengan tradisi keagamaan Islam manapun menyatakan berafiliasi dengan Gerindra, sementara sekitar 22,73 persen lainnya menyatakan berafiliasi dengan Demokrat. Selain Gerindra dan Demokrat, Golkar dan PDI Perjuangan menjadi pilihan terbesar selanjutnya. Jika sekitar 13,64 persen responden yang mengaku tidak dekat dengan tradisi Islam manapun berafiliasi dengan Golkar, sekitar 12,12 persen responden lainnya yang tidak dekat dengan tradisi Islam manapun menyatakan bahwa PDI Perjuangan merupakan afiliasi politik mereka.

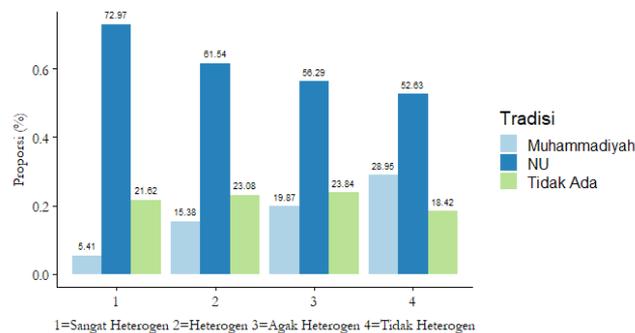
Secara lebih sederhana, afiliasi politik para politisi Muslim tersebut dalam dilihat dalam gambar berikut. Jika mereka yang merasa dekat dengan tradisi Muhammadiyah terkonsentrasi

pada partai-partai Islam Modernis, mereka yang merasa dekat dengan tradisi keagamaan NU tersebar ke semua jenis partai, dengan proporsi terbesar pada partai-partai berhaluan Islam Tradisionalis dan Partai Nasionalis. Sementara itu, responden yang merasa dekat dengan tradisi Islam lainnya lebih terkonsentrasi pada partai-partai Nasionalis-Religius. Akhirnya, responden yang tidak merasa dekat dengan tradisi keagamaan Islam manapun lebih banyak memilih untuk berafiliasi dengan partai-partai berhaluan Islam Modernis.



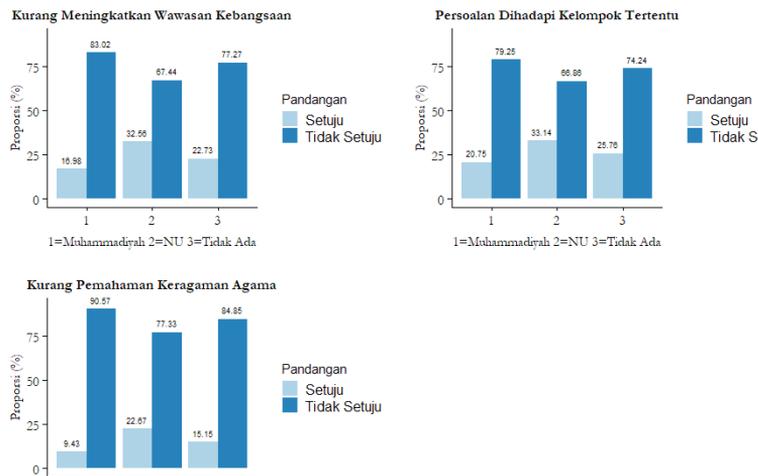
Gambar 10.  
 Persebaran Politisi Muslim Berdasarkan Identitas Politik Partai  
 Sumber: Survei PPIM

Sementara itu, jika kita lihat distribusi politisi Muslim di DPR RI dengan memperhatikan heterogenitas partai politik, perbedaan kecenderungan antar tradisi keagamaan, khususnya antara Muhammadiyah dan NU, kembali terlihat dengan cukup jelas. Sebagaimana terlihat dalam gambar berikut, proporsi politisi Muslim yang merasa dekat dengan tradisi NU akan semakin berkurang seiring dengan semakin kurang heterogennya suatu partai secara sosial keagamaan. Sebaliknya, proporsi politisi Muslim yang merasa dekat dengan Muhammadiyah justru semakin menurun seiring dengan semakin heterogennya sebuah partai secara sosial keagamaan.



Gambar 11.  
 Persebaran Politisi Muslim Berdasarkan Heterogenitas Partai  
 Sumber: Survei PPIM

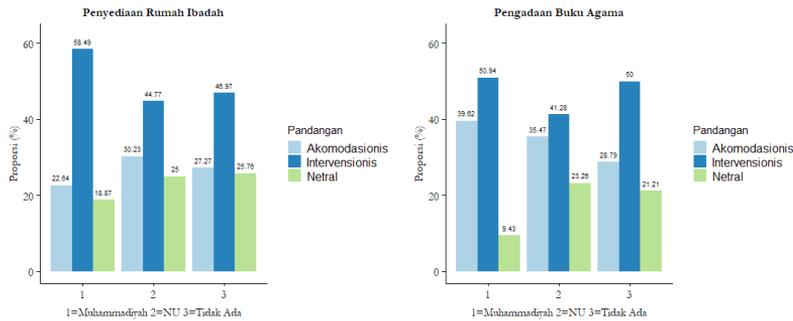
Perbedaan antara responden yang merasa dekat dengan Muhammadiyah dan mereka yang merasa dekat dengan NU kembali terlihat dalam beberapa persoalan terkait dengan pendidikan agama. Gambar berikut menunjukkan bahwa proporsi responden yang mengaku dekat dengan NU terlihat sedikit lebih besar dibanding proporsi responden yang mengaku dekat dengan tradisi Muhammadiyah dalam hal pengakuan terhadap persoalan-persoalan terkait wawasan kebangsaan, hak minoritas untuk memasukkan materi pelajaran mereka dalam pendidikan agama, dan persoalan keragaman agama dalam pendidikan agama. Akan tetapi, mengingat relatif kecilnya perbedaan tersebut, sejauh mana perbedaan ini berpengaruh nyata masih memerlukan pengujian statistik secara lebih mendalam.



Gambar 12.

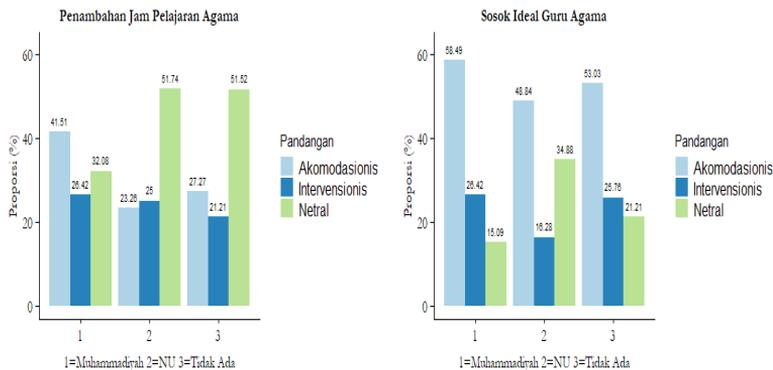
Pandangan Politisi Muslim tentang Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama  
Sumber: Survei PPIM

Lebih lanjut tentang kebijakan pendidikan agama, hasil survei ini menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, responden yang merasa dekat dengan tradisi NU menunjukkan kecenderungan untuk bersikap lebih tidak intervensionis atau lebih netral dibandingkan dengan mereka yang merasa dekat dengan tradisi Muhammadiyah. Ini terlihat, misalnya, dalam hal penyediaan rumah ibadah dan pengadaan buku agama di sekolah. Terkait dengan penyediaan rumah ibadah, sekitar 58,49 persen responden yang mengaku dekat dengan tradisi Muhammadiyah menunjukkan kecenderungan bersikap intervensionis dalam hal penyediaan rumah ibadah. Berbeda dengan hal ini, 'hanya' sekitar 44,77 persen responden yang mengaku dekat dengan tradisi NU yang menunjukkan kecenderungan intervensionis dalam hal serupa. Kedua kelompok politisi Muslim tersebut juga menunjukkan kecenderungan yang berbeda dalam hal pengadaan buku agama. Jika sebanyak sekitar 50,59 persen responden yang mengaku dekat dengan tradisi Muhammadiyah menyatakan memilih sikap intervensionis dalam pengadaan buku agama, 'hanya' sekitar 41,28 responden dari kelompok NU yang menyatakan hal serupa (kecenderungan intervensionis).



Gambar 13.  
 Kecenderungan Intervensionis dalam Pendidikan Agama di Kalangan Politisi Muslim  
 Sumber: Survei PPIM

Selain itu, responden dari tradisi keagamaan Muhammadiyah dan NU juga menunjukkan kecenderungan yang agak berbeda dalam hal penambahan jam pelajaran agama dan gambaran tentang sosok ideal guru agama. Dalam kedua hal ini, proporsi responden dari kelompok Muhammadiyah yang menyatakan kecenderungan ‘netral’ jauh lebih kecil dibandingkan dengan proporsi responden yang menyatakan hal yang sama dari kalangan yang merasa dekat dengan NU.



Gambar 14.  
 Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama di Kalangan Politisi Muslim  
 Sumber: Survei PPIM

## Partai Politik dan Kebijakan Pendidikan Agama

Hasil analisis regresi yang telah didiskusikan dalam bagian-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa afiliasi partai politik berhubungan dengan pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama. Responden dari partai-partai seperti PKS dan PPP menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk bersikap intervensionis sementara mereka yang berasal dari partai-partai seperti PDI Perjuangan dan NasDem menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk bersikap netral. Apa yang menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut? Untuk menjawab

pertanyaan ini, bagian ini akan melihat lebih lanjut sejauh mana perbedaan antar partai tersebut dapat menjelaskan variasi pandangan anggota DPR RI. Jawaban terhadap pertanyaan ini akan bermanfaat bukan hanya untuk menjelaskan lebih lanjut perbedaan pandangan antar anggota DPR RI tentang arah kebijakan pendidikan agama, namun juga menjelaskan apa secara mendasar melandiasi perbedaan antar partai terkait dengan posisi mereka dalam kebijakan pendidikan agama.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, untuk melihat lebih dalam perbedaan antar partai politik dan pengaruhnya terhadap pandangan anggota RI tentang kebijakan pendidikan agama, laporan ini akan melihat pada dua hal, yakni identitas politik dan heterogenitas partai secara agama. Sementara identitas politik merujuk pada sejauh mana agama atau bangsa menjadi dasar atau rujukan utama bagi partai politik dalam merumuskan identitas dirinya, heterogenitas agama dalam kajian ini merujuk pada seberapa heterogen suatu partai berdasarkan agama yang dianut oleh anggota atau elit politiknya. Dalam laporan ini, heterogenitas partai akan melihat pada seberapa banyak jumlah anggota DPR RI yang beragama selain Islam dalam setiap partai. Berdasarkan dua hal tersebut, partai-partai di DPR RI dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 10.  
 Klasifikasi Partai di DPR RI

Kategori Partai I (Identitas Politik)		Kategori Partai II (Heterogenitas Agama)	
Jenis Partai	Partai	Jenis Partai	Partai
Islam Modernis	PAN, PKS, PPP	Agak Heterogen	DEMOKRAT, GERINDRA, PAN, PKB
Islam Tradisionalis	PKB	Heterogen	GOLKAR, NasDem
Nasionalis	PDI Perjuangan, NasDem	Sangat Heterogen	PDI Perjuangan
Nasionalis-Religius	DEMOKRAT, GERINDRA, GOLKAR	Tidak Heterogen	PKS, PPP

Meski masih berkaitan, kedua sistem klasifikasi tersebut memiliki perbedaan penting. Jika klasifikasi kedua mengabaikan perbedaan yang ada antar tradisi keagamaan dalam Islam –dengan menggabungkan PAN dan PKB dalam satu jenis partai–, klasifikasi pertama mengabaikan heterogenitas keagamaan dalam partai. Secara komposisi keagamaan, PAN yang agak heterogen berbeda dengan PKS dan PPP yang tidak heterogen. PDI Perjuangan dan NasDem juga memiliki heterogenitas agama yang jauh berbeda. Akan tetapi, mana di antara kedua model klasifikasi ini yang dapat menjelaskan perbedaan antar partai dalam melihat kebijakan agama dengan lebih baik adalah persoalan empirik yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Untuk itu, laporan ini lebih lanjut akan menganalisis sejauh mana

kedua model klasifikasi tersebut menjelaskan perbedaan pandangan anggota DPR RI dalam hal pendidikan agama.

Tabel 11 dan 12 berikut menunjukkan hasil analisis regresi multinomial terhadap pengaruh identitas politik partai dan heterogenitas agama, secara berurutan, terhadap kecenderungan intervensionis dalam kebijakan pendidikan. Kedua faktor tersebut – identitas politik partai dan heterogenitas agama—menjelaskan dengan baik variasi pandangan anggota DPR RI dalam kebijakan pendidikan agama. Tabel 11 menunjukkan bahwa responden dari partai-partai berhaluan Islam Modernis memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan responden dari partai-partai berhaluan Nasionalis untuk bersikap intervensionis dari pada netral dalam kebijakan pendidikan agama. Sementara itu, Tabel 12 menunjukkan bahwa responden dari partai yang tidak heterogen memiliki kecenderungan yang lebih besar dibandingkan dengan responden yang berasal dari partai yang sangat heterogen secara agama untuk bersikap netral dari pada intervensionis dalam kebijakan pendidikan agama.

Akan tetapi, angka AIC di setiap model pada Tabel 11 selalu lebih kecil dibanding angka AIC pada setiap model di Tabel 12. Hal ini menunjukkan bahwa model yang menggunakan identitas politik partai sebagai variabel bebas (Tabel 11) memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan variasi yang ada dalam data. Dengan kata lain, identitas politik partai menjelaskan perbedaan pandangan anggota DPR RI dalam urusan kebijakan pendidikan agama dengan lebih baik dibanding dengan heterogenitas partai secara agama.

Tabel 11.  
 Identitas Politik Partai dan Kecenderungan Intervensionis  
 dalam Kebijakan Pendidikan Agama

	Penyediaan Buku Agama		Pelatihan Guru Agama	
	Intervensionis	Akomodasionis	Intervensionis	Akomodasionis
Islam Modernis	5,37*** (0,54)	3,08** (0,55)	4,88*** (0,56)	4,50*** (0,59)
Islam Tradisionalis	0,71 (0,45)	0,35** (0,49)	1,30 (0,47)	0,84 (0,54)
Nasionalis	-	-	-	-
Nasionalis-Religius	1,36 (0,38)	1,12 (0,37)	1,99* (0,38)	1,70 (0,42)
AIC	784,87	784,87	739,73	739,73

\*p<0.1; \*\*p<0.05; \*\*\*p<0.01. Koefisien menunjukkan *Relative Risk Ratio*

Partai Nasionalis menjadi *reference group*. Selain variabel-variabel di atas, analisis regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh keanggotaan komisi, asal wilayah, usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial lingkungan tempat tinggal.

Sumber: Diolah dari Survei PPIM

Tabel 12.  
Heterogenitas Partai dan Kecenderungan Intervensionis  
dalam Kebijakan Pendidikan Agama

	Penyediaan Buku Agama		Pelatihan Guru Agama	
	Intervensionis	Akomodasionis	Intervensionis	Akomodasionis
Agak Heterogen	1,56 (0,42)	1,22 (0,38)	2,07 (0,42)	1,43 (0,48)
Heterogan	1,88 (0,47)	2,21* (0,46)	1,97 (0,46)	1,62 (0,51)
Sangat Heterogen	-	-	-	-
Tidak Heterogen	8,80*** (0,73)	5,78*** (0,74)	0,83* (0,73)	1,11** (0,76)
AIC	790,32	790,32	742,59	742,59

\*p<0.1; \*\*p<0.05; \*\*\*p<0.01. Koefisien menunjukkan *Relative Risk Ratio*

Partai 'Sangat Heterogen' menjadi *reference group*. Selain variabel-variabel di atas, analisis regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh keanggotaan komisi, asal wilayah, usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial lingkungan tempat tinggal.

Sumber: Diolah dari Survei PPIM

Berbeda dengan Tabel 11 dan 12, dua tabel berikut menunjukkan hasil regresi multinomial terhadap pengaruh identitas politik partai dan heterogenitas agama dalam partai terhadap kecenderungan anggota DPR RI dalam memilih kebijakan pendidikan agama. Setiap model, baik yang menggunakan identitas politik partai maupun heterogenitas agama dalam partai, dapat menjelaskan perbedaan pandangan anggota DPR RI dalam merumuskan kebijakan pendidikan agama. Dalam kasus gambaran tentang sosok guru agama ideal, Tabel 13 menunjukkan bahwa responden dari partai-partai Islam Nasionalis, Islam Tradisionalis dan Nasionalis-Religius memiliki kecenderungan yang lebih besar dibandingkan responden dari partai Islam Modernis untuk bersikap netral dari pada intervensionis. Namun dalam hal penambahan jam pelajaran agama, hanya responden dari partai Nasionalis yang memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan responden dari partai Islam Modernis untuk berpandangan 'netral' daripada Intervensionis dalam hal penambahan jam pelajaran agama.

Dibandingkan dengan kedua model yang ada dalam Tabel 13, kedua model dalam Tabel 14 juga dapat menjelaskan pengaruh heterogenitas agama terhadap variasi kecenderungan anggota DPR RI dalam merumuskan kebijakan pendidikan agama. Dibandingkan dengan responden dari partai yang tidak heterogen, responden dari partai-partai yang agak heterogen, heterogen dan sangat heterogen secara agama memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memiliki kecenderungan netral dari pada kecenderungan intervensionis. Dalam kasus penambahan jam pelajaran agama, model kedua pada Tabel 14 juga dapat menjelaskan data dengan baik. Model ini menunjukkan bahwa hanya responden dari partai yang sangat heterogen yang memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan responden dari partai yang tidak heterogen untuk berpandangan netral dari pada intervensionis dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

Namun demikian, jika diperhatikan lebih lanjut, kita temukan bahwa setiap model dalam Tabel 14 secara konsisten memiliki nilai AIC yang lebih besar dibandingkan dengan nilai AIC dalam setiap model di Tabel 13. Dengan pertimbangan bahwa keduanya memiliki jumlah variabel bebas yang sama dalam analisis, perbedaan dalam angka AIC ini menunjukkan bahwa kedua model dalam Tabel 13 memiliki kemampuan yang relatif lebih baik menjelaskan variasi yang ada dalam data.

Tabel 13.  
 Identitas Politik Partai dan Kecenderungan Netral  
 dalam Kebijakan Pendidikan Agama

	Sosok Guru Agama Ideal		Penambahan Jam Pelajaran	
	Netral	Akomodasionis	Netral	Akomodasionis
Islam Modernis	-	-	-	-
Islam Tradisionalis	7,05*** (0,58)	1,43 (0,51)	0,97 (0,46)	0,50 (0,51)
Nasionalis-Religius	4,42*** (0,49)	2,10** (0,37)	1,69 (0,39)	0,94 (0,41)
AIC	743,80	743,80	742,76	742,76

\*p<0.1; \*\*p<0.05; \*\*\*p<0.01. Koefisien menunjukkan *Relative Risk Ratio* Partai 'Islam Modernis' menjadi *reference group*. Selain variabel-variabel di atas, analisis regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh keanggotaan komisi, asal wilayah, usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial lingkungan tempat tinggal.  
 Sumber: Diolah dari Survei PPIM

Tabel 14.  
 Heterogenitas Partai dan Kecenderungan Intervensionis  
 dalam Kebijakan Pendidikan Agama

	Sosok Guru Agama Ideal		Penambahan Jam Pelajaran	
	Netral	Akomodasionis	Netral	Akomodasionis
Agak Heterogen	3,12** (0,52)	1,99 (0,42)	1,56 (0,43)	1,26 (0,46)
Heterogen	5,36*** (0,59)	3,01** (0,50)	1,71 (0,48)	0,85 (0,53)
Sangat Heterogen	6,36*** (0,64)	2,15 (0,57)	3,41** (0,58)	1,35 (0,66)
Tidak Heterogen	-	-	-	-
AIC	759,44	759,44	748,05	748,05

\*p<0.1; \*\*p<0.05; \*\*\*p<0.01. Koefisien menunjukkan *Relative Risk Ratio* Partai 'Tidak Heterogen' menjadi *reference group*. Selain variabel-variabel di atas, analisis regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh keanggotaan komisi, asal wilayah, usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial lingkungan tempat tinggal.  
 Sumber: Diolah dari Survei PPIM

## Kesimpulan

Pembahasan dalam bagian-bagian sebelumnya menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, hasil survei ini menunjukkan bahwa tidak banyak anggota DPR RI yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan-persoalan terkait wawasan kebangsaan, akses kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama, dan pemahaman tentang keragaman agama dalam pendidikan agama. Dari total 370 responden survei ini, hanya 19,46 responden yang menilai kurangnya pemberian wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama sebagai satu persoalan serius. Proporsi responden yang menilai masih kurangnya pemberian pemahaman yang baik tentang keragaman di Indonesia sebagai masalah serius lebih sedikit lagi, yakni hanya 12,16 persen dari total 370 responden. Dalam konteks meningkatnya pandangan dan bahkan perilaku intoleran atau eksklusif secara keacamatan di lingkungan sekolah, hal ini menjadi kabar yang kurang menggembirakan bagi DPR RI sebagai lembaga tinggi negara, yang salah satu fungsinya adalah merawat kebinekaan masyarakat di negeri ini.

Kedua, hasil survei juga menunjukkan adanya pandangan yang cukup beragam di kalangan anggota DPR RI tentang peran negara dalam pendidikan agama. Mayoritas responden survei ini menunjukkan kecenderungan akomodasionis dalam kebijakan-kebijakan terkait dengan format dasar pendidikan agama. Ini mencakup pengajaran agama, kegiatan doa bersama dan penyediaan guru agama. Namun demikian, cukup banyak responden yang menunjukkan kecenderungan intervensionis dalam kebijakan negara atau sekolah terkait penyediaan sarana ibadah, buku agama dan pelatihan bagi guru agama. Sementara itu, dalam hal-hal yang terkait dengan pengayaan pendidikan agama, banyak responden yang menunjukkan kecenderungan netral dalam meletakkan peran negara dalam pendidikan.

Dalam beberapa hal, variasi pandangan tersebut memberikan sedikit ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan dukungan politik bagi upaya-upaya untuk membangun budaya yang lebih inklusif dan saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda di sekolah. Akan tetapi, di tengah-tengah meningkatnya sikap atau opini intoleran di lingkungan sekolah, relatif besarnya proporsi responden yang memiliki pandangan intervensionis dalam hal-hal krusial seperti pelatihan guru agama dan pengadaan buku agama layak untuk mendapatkan catatan tersendiri. Di tengah-tengah dominannya pandangan akomodasionis dalam kebijakan-kebijakan terkait format pendidikan agama, relatif besarnya kecenderungan intervensionis, yang memungkinkan negara untuk mengatur lebih lanjut kehidupan keagamaan warga atau siswa di sekolah, tidak memberikan ruang yang lebih besar bagi upaya-upaya untuk menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan menghormati keragaman agama yang ada antar siswa.

Ketiga, hasil studi ini juga menemukan bahwa partai politik memiliki pengaruh yang cukup besar dengan bagaimana anggota DPR RI melihat peran negara dalam pendidikan agama. Perbedaan afiliasi partai politik sedikit banyak menjelaskan perbedaan pandangan responden tentang arah kebijakan pendidikan agama. Dengan kata lain, responden dari partai-partai tertentu memiliki kecenderungan lebih besar untuk bersikap intervensionis dibandingkan dengan responden dari partai-partai lain. Dalam hal penyediaan buku agama di sekolah, misalnya, hasil analisis regresi logit menunjukkan bahwa responden dari PAN, PKS, dan PPP memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan responden dari PDI Perjuangan untuk bersikap intervensionis dibandingkan netral dalam hal penyediaan buku agama di sekolah. Hal serupa –kecuali untuk responden dari PPP—juga ditemukan dalam hal pelatihan guru agama.

Lebih lanjut tentang karakteristik partai politik yang mempengaruhi perbedaan pandangan para responden, penelitian ini menemukan bahwa identitas politik partai memiliki hubungan yang cukup erat dengan pandangan anggota DPR RI tentang peran negara dalam pendidikan agama. Responden dari partai-partai Nasionalis memiliki kecenderungan yang lebih besar dibandingkan dengan responden dari partai-partai Islam Modernis untuk menunjukkan pandangan netral dalam kebijakan pendidikan agama, khususnya dalam kasus penambahan jam pelajaran agama. Sebaliknya, responden dari partai-partai Islam Modernis memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan responden dari partai-partai Nasionalis untuk bersikap intervensionis dalam pendidikan agama, khususnya dalam penyediaan buku agama dan pelatihan guru agama. Bagi masyarakat dan khususnya elemen masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada isu-isu kebangsaan dan kebinekaan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, hasil studi ini memberikan gambaran yang lebih jernih tentang peta politik di DPR RI terkait dengan posisi partai politik dan hal yang melandasainya dalam melihat peran negara dalam pendidikan agama.

Sebagai catatan penutup, hasil survei ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah meningkatnya sikap atau pandangan yang cenderung intoleran di lingkungan sekolah, DPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang memegang peranan penting dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan agama menunjukkan sikap atau posisi yang kurang jelas dalam menyikapi persoalan yang ada. Selain relatif sedikitnya proporsi anggota DPR RI yang memandang masalah-masalah terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan, pemahaman keragaman agama, dan akses kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan sebagai persoalan penting yang harus mendapatkan perhatian serius, banyak anggota DPR RI yang menunjukkan kecenderungan intervensionis dalam meletakkan peran atau kedudukan negara dalam pendidikan agama.

Beberapa hal tersebut mengindikasikan pentingnya upaya DPR RI sebagai lembaga untuk meningkatkan pemahaman para anggotanya tentang persoalan-persoalan mendasar yang dalam pendidikan agama, khususnya terkait peran penting DPR RI

dalam merawat kebinekaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Partai politik juga memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan kader-kadernya yang bertugas di DPR RI, terlebih mereka yang akan berada di komisi-komisi yang menangani masalah pendidikan dan agama, untuk dapat memahami seluk-seluk beluk persoalan pendidikan agama dengan baik, dan menyikapi masalah-masalah yang ada, khususnya terkait dengan masalah-masalah kebangsaan dan keragaman serta meningkatnya gejala intoleransi keagamaan, dengan tepat. Tanpa peran aktif lembaga legislatif untuk mengawasi arah kebijakan pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya, akan susah bagi negara ini untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul akibat meningkatnya intoleransi keagamaan serta mewujudkan budaya sekolah yang toleran dan saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda.

Selain itu, menyadari tantangan besar yang dihadapi oleh DPR RI sendiri untuk mengatasi beberapa kelemahan internalnya, anggota legislatif dan juga partai politik perlu memberikan ruang kontrol demokratis yang lebih luas bagi beragam elemen masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka dalam merumuskan peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah negeri. Di tingkat pusat, DPR RI dan partai politik perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil dalam proses pembahahasan revisi Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mulai diusulkan oleh beberapa kalangan. Kontrol demokratis perlu diberikan bukan hanya bagi perwakilan dari kelompok-kelompok yang besar secara jumlah, melainkan juga dari mereka-mereka yang selama ini terpinggirkan atau terdiskriminasi dalam hal urusan agama sehingga hak-hak kelompok minoritas dalam pendidikan agama tetap terjaga.

Ruang kontrol demokratis tersebut perlu dibuka bukan hanya di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat lokal dan bahkan hingga di tingkat sekolah. Perumusan aturan atau kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama perlu memberi ruang yang seluas-luasnya bagi perwakilan masyarakat, khususnya wali murid, untuk menjaga dan memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari apapun agamanya, mendapat layanan pendidikan agama dan perlakuan yang baik di sekolah tempat mereka belajar. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan budaya sekolah yang ramah dengan keragaman dan lebih menghormati perbedaan yang ada di antara siswa dan di lingkungan sekolah pada umumnya.



## Daftar Pustaka

Fossati, Diego, Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi dan Eve Warburton, 2020, "Ideological Representation in Clientelistic Democracies: The Indonesian Case", *Electoral Studies* 63 (February 2020).

Hanan, Djayadi, 2014, *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia*. Jakarta: Mizan.

Ismatu Ropi, 2017, *Religion and Regulation in Indonesia*, Singapore: Palgrave Macmillan.

King, Dwight, 2003, *Half-hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*. Westport, CT and London: Praeger.

Kuru, Ahmed T., 2007, "Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and State Policies toward Religion", *World Politics* 59 (4): 568-594.

Kuru, Ahmet, 2009, *Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France and Turkey*. Cambridge: Cambridge University Press.

Muhtadi, Burhanuddin, 2019, *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.

Nisa, Yunita F., 2019, "Pelita yang Meredup: Keberagamaan Guru Agama Sekolah/ Madrasah di Indonesia", *Convey Report* Vol. 2, No. 1, Jakarta: PPIM UIN Jakarta.

Saputra, Rangga Eka, 2018, "Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z", *Convey Report* Vol. 1, No. 1, Jakarta: PPIM UIN Jakarta.

Schreiner, Peter, 2005, "Religious Education in Europe," available online <https://comenius.de/pdfs/themen/europa2.pdf> [28 Desember 2019].

Skeie, Geir, 2006, "Diversity and the Political Function of Religious Education." *British Journal of Religious Education* 28 (1): 19-32.

Ufen, Andreas. 2008. "From *Aliran* to Dealignment: Political Parties in Post-Suharto Indonesia", *South East Asia Research* 16 (1): 5-41.

## Profil Penulis dan Peneliti

**Sirojuddin Arif** adalah peneliti pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang Antropologi pada Universitas Gadjah Mada. Ia kemudian melanjutkan pendidikan master dalam bidang *Interdisciplinary Islamic Studies* pada UIN Jakarta dan master dalam bidang Antropologi Sosial pada Universitas Oxford. Gelar doktoral dalam Ilmu Politik diraihnya dari Northern Illinois University. Minat penelitian utamanya adalah kajian agama dan politik dan politik ekonomi pembangunan. Beberapa tulisannya telah terbit di *IDS Bulletin* dan *Journal of International Development*. Selain peneliti di PPIM UIN Jakarta, dia juga merupakan dosen pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah dan peneliti mitra pada the SMERU Research Institute, Jakarta.

**Yunita Faela Nisa** adalah peneliti pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia merupakan koordinator survei nasional PPIM UIN Jakarta tentang Pandangan Anggota DPR RI tentang Demokrasi, Kebangsaan dan Pendidikan Agama (2019), dan survei nasional tentang Sikap Keberagamaan Siswa/Mahasiswa dan Guru/Dosen di Indonesia (2017 dan 2018). Lulusan S3 dalam bidang Psikologi Sosial di Universitas Indonesia (2015) ini menulis disertasi tentang Perilaku Meneruskan Berita Daring di Indonesia: *Narrowcast versus Broadcast*. Keahliannya terkait Metodologi Penelitian dan Statistika mendukungnya dalam berbagai penelitian yang ia lakukan. Beberapa grant yang pernah ia dapatkan antara lain The Witkin Okonji Travel Award untuk mengikuti *Advanced Statistics: Multilevel Analysis* dalam Summer School Program di University of Guelph, Ontario, Canada serta International Travel Award for Psychology Students dari APA (American Psychological Association) pada 2015 di Toronto, Canada.

**Agung Priyo Utomo**, adalah ahli Statistika pada survei nasional PPIM tentang Pandangan Anggota DPR RI tentang Demokrasi, Kebangsaan dan Pendidikan Agama (2019), dan survei nasional tentang Sikap Keberagamaan Siswa/Mahasiswa dan Guru/Dosen di Indonesia (2017 dan 2018). Lulusan S1 dan S2 Universitas Gajah Mada Program Studi Statistika ini merupakan salah satu Ketua Jurusan di Politeknik Ilmu Statistika (dulu Akademi Ilmu Statistika - AIS). Keahliannya dalam bidang Statistika sudah dimanfaatkan dalam penelitian dan survei dan yang diselenggarakan oleh beberapa kementerian di Indonesia.

**Bambang Ruswandi**, adalah ahli Statistika pada survei nasional PPIM tentang Pandangan Anggota DPR RI tentang Demokrasi, Kebangsaan dan Pendidikan Agama (2019), dan survei nasional tentang Sikap Keberagamaan Siswa/Mahasiswa dan Guru/Dosen di Indonesia (2017 dan 2018). Alumni Jurusan Statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) ini telah membantu banyak penelitian di beberapa instansi.

## Profil Lembaga

***Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta*** merupakan lembaga penelitian otonom di bawah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. PPIM UIN Jakarta didirikan pada tahun 1994 dan secara berkesinambungan melakukan penelitian, advokasi dan publikasi dalam isu-isu kehidupan dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Bersama UNDP Indonesia, PPIM UIN Jakarta sejak tahun 2017 melakukan program *Countering Violent Extremism for Youth* (CONVEY) Indonesia. Sebuah program yang bertujuan membangun perdamaian di Indonesia berbasis pada potensi pendidikan agama dengan menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan dan kekerasan di kalangan generasi muda. Selain itu, sejak berdirinya sampai saat ini, PPIM UIN Jakarta juga menerbitkan Jurnal ***Studia Islamika***, sebuah jurnal bereputasi internasional yang berfokus pada kajian Islam di Indonesia dan Asia Tenggara.







Collaborative Program:



Empowered lives.  
Resilient nations.

Gedung PPIM UIN Jakarta  
Jalan Kertamukti No. 5 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia  
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com) |  
Website: <https://conveyindonesia.com>

